

PENGABDIAN MASYARAKAT **PARIWISATA**



Benny I. Towoliu
Bernadain D. Polii

Pengabdian Masyarakat Pariwisata

Benny Irwan Towoliu, SE., M.Par

Dr. Bernadain D. Polii, S.Pd., M.Pd

Penerbit POLIMDO PRESS



PENGABDIAN MASYARAKAT PARIWISATA

Hak Cipta © Benny Irwan Towoliu, SE., M.Par
 © Dr. Bernadain D. Polii, S.Pd., M.Pd

Hak Penerbit pada POLIMDO PRESS

Penerbit POLIMDO PRESS Politeknik Negeri Manado.
Jl. Raya Politeknik, Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget
Manado – Sulawesi Utara, PO BOX 1256
Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Kantor Pusat Lantai 1, Kampus Politeknik Negeri Manado
<http://p4m.polimdo.ac.id/polimdopress>
polimdopress@polimdo.ac.id

Cetakan Buku Pertama, Nopember 2021

ISBN : 978 – 623 – 5928 – 27 - 2

vi; 62 hal. : 21,0 x 29,7 cm

Setting & Layout : Bertje H. Sumakul, SE
Cover Design : Benny I. Towoliu, S.E., M.Par

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun, termasuk fotocopy tanpa izin tertulis dari penerbit. Pengutipan harap menyebutkan sumber.

Dicetak oleh POLIMDO PRESS

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang maha Kuasa, maka penulisan *Pengabdian Masyarakat Bina Desa Wisata*, ini akan dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengerjakan buku ajar ini. Ucapan yang sama juga ditujukan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik Dr. Tineke Saroinsong dan Antonius P.G. Manginsela selaku Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu, yang memberikan kesempatan yang sama bagi kami dosen di jurusan pariwisata untuk mengembangkan berbagai bahan ajar termasuk buku ajar.

Penyusunan buku ajar ini dimaksudkan sebagai salah satu pegangan bagi Mahasiswa dan Dosen pengajar mata kuliah Pengabdian Masyarakat di Jurusan Pariwisata, disamping belum tersedianya bahan ajar yang memadai untuk mata kuliah ini, serta kurangnya bahan ajar ataupun literatur untuk mata kuliah ini yang tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Manado. Materi bahan ajar ini terdiri dari 5 topik yang meliputi:

- Topik 1. Pariwisata, Pemberdayaan Desa,
- Topik 2. Strategi Pengembangan Desa Wisata,
- Topik 3. Model Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat,
- Topik 4. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat,
- Topik 5. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- Topik 6. Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pariwisata.

Buku ajar ini disusun dengan maksud agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan, skill dan attitude mereka untuk diterapkan di desa wisata.

Akhirnya buku ajar ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan oleh tim penyusun untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga buku ajar ini bermanfaat sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen dan pihakpihak lainnya yang ingin untuk melakukan pengabdian masyarakat didesa wisata.

Terima kasih.

Manado, November 2021

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
BAB 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan dan Manfaat	2
Ruang Lingkup	2
Petunjuk Penggunaan Buku	2
BAB 2 Pariwisata, Pemberdayaan Desa	
Tujuan Pembelajaran	3
Pengantar	3
2.1. Pengertian Pariwisata	3
2.2. Pemberdayaan Masyarakat	5
2.3. Pengertian Desa	8
Ringkasan.....	13
Latihan Soal	13
Tes Formatif.....	13
BAB 3 Strategi Pengembangan Desa Wisata	
Tujuan Pembelajaran	14
Pengantar	14
3.1. Teori Strategi	14
3.2. Strategi Pengembangan Desa Wisata	17
Ringkasan.....	20
Latihan Soal	20
Tes Formatif.....	20
BAB 4 Model Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	
Tujuan Pembelajaran	21
Pengantar	21
4.1. Model Partisipasi Dalam Pembangunan	21
4.2. Pentingnya Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat....	23
4.3. Mewujudkan Masyarakat Partisipatif Dengan Metode Participatory Rural Appraisal.....	26
4.4. Macam dan Bentuk Partisipasi Masyarakat	29
Ringkasan.....	31
Latihan Soal	31

	Tes Formatif.....	31
BAB 5	Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
	Tujuan Pembelajaran	32
	Pengantar	32
	Partisipasi Berbasis Masyarakat – Community Based Tourism.....	32
	Ringkasan.....	35
	Latihan Soal	35
	Tes Formatif.....	35
BAB 6	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	
	Tujuan Pembelajaran	36
	Pengantar	36
	6.1.Bentuk Kegiatan.....	36
	6.2.Sifat Kegiatan.....	38
	6.3. Langkah-langkah Pengabdian Kepada Masyarakat	38
	Ringkasan.....	41
	Latihan Soal	41
	Tes Formatif.....	41
BAB 7	Program-Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pariwisata	
	Tujuan Pembelajaran	41
	Pengantar	41
	7.1. Model Desimalisi Hasil Penelitian Bidang Pariwisata.....	42
	7.2.Model IpM(Ipteks bagi Masyarakat)	52
	Ringkasan.....	59
	Latihan Soal	59
	Tes Formatif.....	59
	Daftar Pustaka	60
	Glosarium	61
	Indeks	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal.
Gambar 7.1.	Pemberian Materi Pelatihan	46
Gambar 7.2	Artkel Koran	57

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini Pariwisata dijadikan telah dijadikan sebagai *leading sector* perekonomian negara yang termasuk juga didalamnya perekonomian di daerah (propinsi, kabupaten dan kota) di seluruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia ini. Berbagai daerah di Indonesia melakukan kegiatan promosi yang sangat gencar untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara maupun wisatawan local untuk datang berkunjung didaerahnya, dengan menawarkan berbagai jenis objek wisata seperti: budaya, alam, dan kuliner.

Dengan demikian banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati objek wisata yang ditawarkan sesuai dengan keinginan mereka di daerah tujuan wisata (*tourist destination region*). Kecepatan informasi melalui teknologi informasi mempengaruhi juga wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata, dimana dalam sepersekian detik masyarakat dunia dapat mengetahui lokasi-lokasi wisata tertentu, mulai dari yang sudah viral bahkan yang belum viral pun bisa diketahui, oleh karena aplikasi informasi yang dibagikan oleh pribadi maupun oleh kelompok orang. Namun kecepatan destinasi tertentu untuk diketahui oleh masyarakat dunia, tidak dibarengi oleh kesiapan masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki, banyak kasus tertentu ketidaksiapan objek dan daya tarik wisata bisa tumbuh dengan cepat tapi juga bisa mati dengan cepat hanya karena sumber daya yang mengelola potensi yang tidak mengerti dan paham dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki.

Salah satu terobosan yang dianggap mampu untuk menjembatani gap tersebut adalah perlunya dunia akademik yang memiliki kompetensi-kompetensi pariwisata untuk terlibat secara langsung melatih dan membina masyarakat local yang ada didesa-desa wisata sehingga masyarakat paham dan tahu cara-cara pengelolaan pariwisata dengan baik dan benar.

Dalam kurikulum merdeka belajar saat ini, memang program kegiatan ini dinamakan bina desa. Bina desa adalah salah satu pilihan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka dapati selama proses pembelajaran dikampus untuk turun ke masyarakat dan dipraktikan pada masyarakat local/desa.

Namun pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki oleh mahasiswa saja tidak cukup siap tanpa adanya panduan pembimbingan yang tepat sebagai alat perlengkapan bagi

mereka untuk turun berhadapan dengan masyarakat local yang memiliki latar belakang Pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda pada tiap desa yang berbeda.

Tujuan dan Manfaat

Bahan ajar ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat pariwisata. Sebagai panduan bagi mahasiswa ketika mereka akan turun melakukan kegiatan pengabdian khusus bina desa bidang pariwisata, minimal mereka mengerti bagaimana berhadapan dengan masyarakat, tahu melakukan pendekatan dan juga tahu memaksimalkan pengetahuan dan ketrampilan ketika mereka akan melatih masyarakat.

Secara khusus buku ajar ini akan digunakan sebagai pegangan mahasiswa perhotelan Diploma IV yang akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Buku ajar ini disusun secara sistimatis untuk mempermudah mahasiswa untuk mempelajari dan memahami materi ini sehingga mereka dapat mengaplikasikannya pada saat melakukan kegiatan masyarakat di desa wisata.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penyusunan bahan ajar ini adalah diharapkan setelah selesai mempelajari setiap pokok bahasan mahasiswa akan memiliki pengetahuan mengenai pengabdian masyarakat, dan mampu mempraktikkan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya di desa wisata.

Ruang Lingkup

Bahan ajar ini akan membahas bagaimana melakukan pengabdian melalui beberapa kegiatan pendekatan pada masyarakat dan cara mengalipkasikan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat selama proses perkuliahan di kampus dan praktik magang di industry perhotelan.

Petunjuk Penggunaan Buku

Mahasiswa atau siapaun yang ingin memahami masalah kegiatan pengabdian masyarakat pariwisata, maka hal pertama yang perlu dilakukan ialah dengan membaca terlebih dahulu pendahuluan, tujuan, ruang lingkup serta manfaat yang akan dicapai atau diperoleh dari mempelajari bahan ajar ini, dan selanjutnya membaca setiap pokok bahasan, kemudian mencoba untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan soal latihan yang telah disediakan atau disiapkan diakhir setiap pokok bahasan. Jika masih belum memahami sepenuhnya bahan ajar yang disajikan, maka disarankan untuk membaca lebih jauh melalui referensi pustakan yang ada dalam bahan bahan ajar ini.

BAB 2

PARIWISATA, PEMBERDAYAAN DESA

Tujuan Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran ini mahasiswa mampu dapat:

- ✚ *Menjelaskan pariwisata*
- ✚ *Menjelaskan pemberdayaan*
- ✚ *Menjelaskan desa.*

Pengantar

Potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia memberikan dampak positif bagi pembangunan, terutama dalam sector pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu industry yang bergerak dalam bidang pelayanan dan jasa yang menjadi andalan bangsa Indonesia dalam mendongkrak devisa negara. Perkembangan pariwisata saat ini sangat signifikan dan beragam sehingga menjdai destinasi pariwisata yang menarik, unik dan menjadi tujuan wisata dunia.

Pengembangan pariwisata telah memberikan dampak, baik secara langsung dan tidak langsung serta dampak lanjutan. Dampak langsung sungguh dirasakan oleh pemerintah, pengelola wisata dan masyarakat yang secara langsung bergelut di sector pariwisata. Dampak tidak langsung yaitu bagi masyarakat yang tidak berada dikawasan wisata sebagai contoh meningkatnya permintaan akan transportasi umum, sedangkan dampak berkelanjutan yaitu bagi masyarakat yang tidak berada dalam kawasan destinasi, namun dalam jangka panjang mendapat peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti meningkatnya permintaan akan penginapan membuat masyarakat sekitar mendirikan pemondokan sebagai penginapam atau homestay.

2.1. Pengertian Pariwisata

Beberapa pengertian terkait pariwisata menurut (Undang-undang Nomor 90 Tahun 1990):

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

2.1.1. Produk Wisata

Menurut Kotler & Gary (2008) dalam Hayat (2018), produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar orang terkait perhatiannya, ingin memperolehnya, menggunakannya dan mengkonsumsinya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya. Sedangkan menurut Alma (2011), dalam Hayat (2018), produk bukan hanya berbentuk sesuatu yang berwujud seperti pelayanan jasa. Semua diperuntukan guna memuaskan kebutuhan dan memuaskan keinginan. Produk wisata menurut Yoeti (2008) , dalam Hayat (2018) memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3 bagian:

1. Atraksi objek wisata yang termasuk di dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan.
2. Fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengelolaan makanan, parkir, transportasi, rekreasi dan lain-lain.
3. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut atau aksesibilitas.

Sedangkan menurut Rahayu (2010) dalam Hayat (2018), atribut produk wisata mencakup:

1. *Destination Attraction.*
2. *Destination Facilities and Service.*
3. *Accessibilities of Destination.*
4. *Image of Destination.*
5. *Price to The Customer.*

2.1.2. Prasarana dan Sarana Obyek Wisata

Wisatawan adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu, baik sarana maupun prasarana kepariwisataan sesungguhnya merupakan tourist

supply yang perlu dipersiapkan atau disediakan bila kita hendak mengembangkan pariwisata.

Prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang memungkinkan suatu proses dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah semua fasilitas yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Oleh karena itu, sebelum seseorang wisatawan melakukan perjalanan wisata terlebih dahulu ia ingin mengetahui tentang apa saja yang sudah disediakan, sesuai dengan yang dijabarkan oleh Oka A. Yoeti, dalam Hayat (2018) yaitu:

1. Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan ke daerah tujuan wisata yang akan ingin dikunjunginya.
2. Fasilitas akomodasi, yang merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjunginya.
3. Fasilitas *catering service*, yang dapat memberi pelayanan mengenai makan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing.
4. Objek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan dikunjunginya.
5. Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan ditempat yang akan dikunjungi tersebut.
6. Fasilitas pembelajaran, dimana ia dapat membeli barang-barang pada umumnya dan *souvenir* atau cinderamata pada khususnya.

Semua ini menyangkut prasarana dan sarana kepariwisataan yang harus diadakan sebelum kita mempromosikan suatu daerah tujuan wisata (Oka A. Yoeti, 1985), dalam Hayat (2018).

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004), dalam Hayat (2018), pemberdayaan masyarakat secara lebih rinci adalah:

“Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan dan kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.”

Sedangkan menurut Simon (1999) dalam Hayat (2018) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*:

“Pemberdayaan adalah suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*selfdetermination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melauinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Dengan demikian, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksa, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat.”

Simuh (1999) yang dikutip oleh Syukani (1999) , dalam Hayat (2018), mengemukakan bahwa:

Pemberdayaan adalah sebuah konsep falsafah pembangunan yang mengakulturasikan antara nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat tradisional dengan teknologi modern serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Di dalam pemberdayaan ini, terdapat unsur yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri sendiri dan memanfaatkan nilai yang ada untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.”

Sedangkan menurut Chambers (1995) yang dikutip oleh Kartasasmita (1996), dalam Hayat (2018), pemberdayaan manusia adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan pradigma baru yang berkembang, yaitu yang bersifat “*peoplecentered, praticipatory, empowering, and sustainable.*”

Maka, dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhandan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998), dalam Hayat (2018). Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suatu atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada

masyarakat yang sama sekali tanpa, memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi, kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu, hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut, perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik), menurut Ambar, akan memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan

kebutuhannya tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat, diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar, maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004) , dalam Hayat (2018).

2. *Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumodiningrat*, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 1998) dalam Hayat (2018). Dilihat dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan melalui suatu masa belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut, tetap mempertahankan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan di muka, proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui menurut Ambar meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual berupa kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Teguh, 2004) dalam Hayat (2018).

2.3. Pengertian Desa

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Paul H. Landis, desa adalah penduduknya yang kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
2. Ada pertalian perasaan yang sam tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum uyang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan graris adalah bersifat sambilan.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa disebutkan susunan organisasi pemerintahan desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.

1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf kehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.

2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

3. Desa Maju atau Desa Swasembada

Desa maju adalah yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

4. Desa Wisata

Desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatawan, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke

desa tersebut, seta mampu menggerakkan aktifitas ekonomi pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(Muliawan, 2008) dalam Hayat (2018).

Menurut Muliawan (2008) dalam Hayat (2018), kriteria dari desa wisata adalah sebagai berikut:

1. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
2. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa: akomodasi/penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan/tamu, atau fasilitas pendukung lainnya.
3. Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut.
4. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan (sebagai desa wisata).

Sedangkan elemen-elemen yang dikategorikan sebagai desa wisata adalah:

1. Karakteristik Objek Wisata

Selain beberapa persyaratan di atas, ada pula tiga karakteristik utama dari objek wisata yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan suatu objek wisata tertentu agar menarik dan dikunjungi banyak wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh Oka A. Yoeti, (1985) dalam Hayat (2018), antara lain:

- a) Daerah itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai "*something to see*". Artinya ditempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, daerah itu harus mempunyai daya tarik yang khusus dan unik.
- b) Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah "*something to do*". Artinya ditempat tersebut selain banyak yang dapat disaksikan, harus disediakan pula fasilitas rekreasi atau *amusement* yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- c) Di daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan istilah "*something to buy*". Artinya, di tempat tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh dibawa pulang.

2. Jenis Objek Wisata

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, muncullah berbagai macam jenis objek wisata yang lama kelamaan mempunyai cirinya tersendiri. Perkembangan ini bertujuan untuk memahami kebutuhan wisatawan yang saat ini melakukan perjalanan wisata berdasarkan alasan dan tujuan yang berbeda-beda. Berikut adalah yang diuraikan oleh, Nyoman S. Pendit (1994) dalam Hayat (2018) mengenai beberapa jenis objek wisata yang dikelompokkan berdasarkan alasan motivasi serta tujuan wisatawan dalam melakukan suatu perjalanan wisata, antara lain:

a) Objek wisata budaya

Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang, dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain, untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup dan seni mereka.

b) Objek Wisata Kesehatan

Perjalanan seorang wisatawan ke objek wisata ini mempunyai tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan kesehatannya dan untuk beristirahat.

c) Objek wisata olahraga

Wisatawan yang melakukan perjalanan ke objek wisata ini mempunyai tujuan untuk berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.

d) Objek wisata komersial

Perjalanan yang dilakukan objek wisata ini dengan tujuan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial.

e) Objek wisata politik

Perjalanan ke objek wisata ini dilakukan dengan tujuan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik

f) Objek wisata *pilgrim*

Perjalanan wisata ke tempat ini sering dihubungkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat, kepercayaan wisatawan, dan biasanya mempunyai tujuan yang dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman, dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.

g) Objek wisata bahari

Perjalan ke objek wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, atau berkeliling melihat taman dengan pemandangan indah di bawah permukaan air (Nyoman S.

Pendit, 1994) dalam Hayat (2018).

Menurut ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*, 1999) dalam Hayat (2018), terdapat prinsip-prinsip dasar dalam wisata budaya, yaitu :

1. Wisata domestik dan internasional merupakan suatu alat yang paling penting dalam pertukaran budaya. Karena itu, konservasi budaya harus menyediakan tanggung jawab dan kesempatan bagi masyarakat lokal dan pengunjung untuk mengalami dan memahami warisan komunitas dan budayanya.
2. Hubungan antara tempat historis dan wisata bersifat dinamis serta melibat nilai-nilai yang mempunyai konflik. Hal tersebut harus dapat dikelola dalam suatu cara yang mendukung generasi saat ini dan yang akan datang.
3. Perencanaan wisata dan konservasi untuk tempat-tempat warisan budaya harus dapat menjamin bahwa pengalaman yang di dapat pengunjung akan berharga, memuaskan, dan menggembirakan.
4. Masyarakat asli dan penduduk dipermukiman harus dilibatkan dalam perencanaan konservasi dan wisata.
5. Aktivitas dan konservasi harus menguntungkan bagi penduduk asli.
6. Program wisata budaya harus dapat melindungi dan meningkatkan karakteristik warisan alam dan budaya.

Lebih lanjut, ICOMOS menyatakan bahwa wisata budaya dapat dilihat sebagai aktivitas pariwisata yang dinamis dan sangat terkait dengan pengalaman. Wisata budaya mencari pengalaman yang unik dan indah dari berbagai warisan masyarakat yang sangat bernilai dan harus di jaga dan diserahkan kepada generasi penerus.

Pengembangan berasal dari kata kerja “berkembang” yang berarti mekar terbuka, menjadikan besar, menjadikan maju (Kamus Bahasa Indonesia 2005). Dalam hal ini, pengembangan adalah membuat atau mengadakan atau mengatur sesuatu yang belum ada. Karena desa wisata adalah desa yang memiliki potensi keunikkan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya, dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana sehingga siap menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi yang dapat

meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Maka, secara spesifik pengembangan desa wisata dapat di artikan sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata.

Ringkasan

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara suka rela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang memungkinkan suatu proses dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah semua fasilitas yang dapat memberikan pelayanan bagi kedatangan wisatawan. Pemberdayaan merupakan penciptaan suatu atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian pariwisata dari 2 orang ahli dan simpulkan dengan menggunakan kata-kata sendiri?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan pemberdayaan?
3. Jelaskan yang dimaksud dengan desa wisata?

Tes Formatif

Essay

1. Sebutkan dan jelaskan pemberdayaan desa?
2. Apa tujuan dari pemberdayaan desa, jelaskan?
3. Sebut dan jelaskan tingkat perkembangan desa?

BAB 3

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA

Tujuan Pembelajaran:

Pada akhir pelayaran ini mahasiswa dapat:
Menjelaskan strategi pengembangan desa wisata

Pengantar

Saat ini keberadaan tempat atau lokasi wisata telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, lingkungan dan menciptakan kemandirian terhadap objek wisata, antara lain masyarakat sekitar berdampak terhadap kemandirian ekonominya; bagi lingkungan tercipta kemandirian lingkungan yang ditandai keasrian dan keterawatan lingkungan secara baik dan sebagainya. Tidak hanya itu peningkatan pendapatan asli daerah juga berpengaruh secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara merata dan baik yang dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Desa adalah bagian pemerintahan terkecil yang ada di tingkat kabupaten/kota. Dan setiap desa diharapkan dapat menggali potensi sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimaksimalkan sebagai bagian dari potensi wisata. Dengan demikian pariwisata dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat yang tinggal di desa. Banyak desa saat ini telah berhasil menghidupi masyarakatnya dari kegiatan pariwisata. Namun dalam memanfaatkan semua potensi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa serta masyarakat dan didukung dengan lembaga- Lembaga lainnya seperti dunia Pendidikan sebagai mitra dalam membangun pariwisata di desa, serta dibutuhkan strategi-strategi yang mempunyai sehingga desa bisa berkembang menjadi sebuah destinasi pariwisata.

3.1. Teori Strategi

Pengertian strategi menurut para ahli berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Mahenken (2007) dalam Hayat (2018) menjelaskan secara sederhana bahwa dalam studi strategi terdapat dua jenis teori: Pertama, teori perang yang digunakan untuk menggunakan segala kekuatan yang bersifat militeristik serta segala sumber daya yang dimiliki dengan tujuan utama untuk memenangkan peperangan. Kedua, teori strategi bisnis yang dikembangkan oleh para pebisnis dan manajer demi tercapai profit maksimal".

Porter menjelaskan bahwa dalam teori strategi bisnis, ada empat pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu: *Pertama*, adanya dua istilah penting dalam pendekatan yang membentuk sebuah teori strategi, yaitu *frameworks* dan *model's* yang memiliki hubungan timbal balik dalam mengidentifikasi variabel yang ada. *Kedua*, adanya sebuah rantai kausalitas yang berhubungan dan berkaitan dengan faktor-faktor kausal yang ada. *Ketiga*, perlunya memperhatikan sebuah rentang waktu dimana suatu hal yang awalnya efektif namun karena adanya sebuah rentang waktu, hal tersebut dapat berubah menjadi hal yang tidak efektif lagi. *Terakhir*, yaitu adanya sebuah pengkajian secara empirik dimana dengan adanya pengkajian empirik ini, sebuah teori strategis akan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh kalangan akademisi serta khalayak luas (Porter, 1991) dalam Hayat (2018).

Sedangkan Richard Whittington membagi pendekatan dalam studi strategi menjadi empat, yaitu: pendekatan evolusioner, klasik, proses, dan sistem. *Pendekatan evolusioner* adalah sebuah pendekatan yang cenderung pesimis atas kemampuan manusia dalam membuat sebuah perencanaan rasional serta menekankan *survival* sebagai tujuan yang utama karena pendekatan ini melihat bahwa adanya suatu seleksi alam dalam pasar dan dunia bisnis pada khususnya. Para pemikir evolusioner menyatakan bahwa untuk dapat bertahan hidup, suatu perusahaan atau individu harus mampu membuat dirinya berbeda dari kompetitornya agar mereka dapat bertahan dari proses persaingan yang ketat dan keras.

Pendekatan klasik adalah sebuah pendekatan yang berawal pada masa Yunani Kuno dimana keuntungan merupakan tujuan utama dari sebuah bisnis dan perencanaan rasional adalah cara untuk mencapainya. Kunci dari pemikiran klasik ini adalah persiapan yang berupa perencanaan yang matang, *profit-maximizing* yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, dan penggunaan analisis rasional.

Pendekatan proses menekankan proses pembuatan serta pelaksanaan strategi yang di dalam pelaksanaan yang diyakini ada sebuah proses *bargaining* atau diplomasi. Pendekatan ini juga memiliki argumen bahwa strategi ada bukan dari pilihan atau dipilih, melainkan melalui suatu proses pemrograman atau pembuatan. Menurut pendekatan ini pula, strategi dipandang sebagai suatu cara atau alat untuk menyederhanakan berbagai hal di dunia yang terlalu kompleks dan kacau untuk dipahami.

Pendekatan sistem yaitu pendekatan yang lahir sebagai sebuah antitesis dari pendekatan evolusioner dan juga pendekatan proses. Pendekatan ini berasumsi bahwa tujuan dari strategi dan cara-cara pembuatan strategi sangatlah bergantung pada karakteristik sosial strategi dan konteks sosial dimana strategi beroperasi, karena pendekatan ini menganggap bahwa pembuat keputusan bergantung sistem sosial di

sekitarnya sebelum menentukan suatu tindakan atau keputusan karena keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan kalkulasi individu dalam transaksi murni ekonomi, tetapi juga orang-orang yang berakar mendalam dalam sistem sosial (Whittington, 2001).

1. Strategi Pengembangan Pariwisata

Menurut Suryono (2004) dalam Hayat (2018), strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan saranaprasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan mengantisipasi hambatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Moeljarto (1996) dalam Hayat (2018) dapat dilihat dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut: a) Pembentukan Kelompok.

Pembentukan kelompok merupakan fase awal dari pemberdayaan, artinya masyarakat miskin atau masyarakat lemah diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang diinginkannya. Pembentukan kelompok menyediakan suatu dasar bagi terciptanya kohesi sosial anggota kelompok.

- b) Pendampingan Fungsi.

Pendampingan sangat krusial dalam membina aktivitas kelompok. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung), ataupun dinamisator (penggerak). Melalui pendampingan, kelompok diharapkan tidak tergantung pada pihak luar namun dapat dibantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri.

- c) Perencanaan Kegiatan

Tahap perencanaan kegiatan melengkapi tahap-tahap sebelumnya yang mementingkan peran aktif anggota kelompok untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuannya. Prinsip-prinsip penting dalam tahap perencanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Prinsip keterpaduan. Dalam prinsip ini berarti suatu kegiatan pemberdayaan harus terkait dengan kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup daerah tersebut.

- 2) Prinsip kepercayaan. Kepercayaan harus ada dalam partisipasi dan pemberdayaan.
- 3) Prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harus mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kesetiakawanan dan kemitraan antar anggota kelompok.
- 4) Prinsip kemandirian. Prinsip ini menekankan bahwa kegiatan atau program harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri bahwa masyarakat miskin mampu menolong dirinya sendiri dan bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup anggota kelompok serta harus dapat berkembang secara berkesinambungan.

3.2. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Tak bisa dipungkiri Indonesia merupakan negaran kekayaan dengan ekowisatem terlengkap dimana dengan sumber daya alam yang ada serta didukung dengan budaya yang beragam menjadikan potensi pengembangan desa begitu kuat. Keberagaman alam dan social budaya yang lengkap ini dikat dalam satu filososi bangsa yang berbunyi *Bhineka Tunggal Ika* (berbeda -beda tetap 1). Sebab Syah menyebutkan bahwa strategi yang tepat dalam membangun desa wisata adalah: melalui konsep *Bhinneka Tunggal Ika* yang mencerminkan keberagaman kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang menjadi identitas kemudian menjadi satu konsentrasi destinasi wisata tanpa adanya persaingan dalam merebut wisatawan.

2. Peluang yang dapat dikembangkan desa wisata di Indonesia melalui beberapa kekayaan yang dimiliki. Antara lain wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif. Dilanjutkan dengan pembinaan masyarakat yang diharapkan ekonomi desa juga ikut maju.

Namun, memutuskan konsep desa wisata dapat dimulai dari tingkat RT hingga kepala desa dengan tetap menerima masukan dan pandangan camat serta walikota/bupati setempat. Dia menyebutkan sejumlah saran dalam menerapkan strategi tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku stakeholder harus memberikan ruang gerak yang bebas kepada masyarakat untuk berkreaitivitas dalam usaha membangun desa wisata.
- 2) Dukungan yang diberikan kepada masyarakat di desa wisata perlu berkesinambungan dan terus menerus namun tetap melakukan tahap monitoring dan evaluasi sehingga tidak berjalan stagnan.

- 3) Masyarakat dituntut lebih proaktif dalam rangka mengapresiasi diri agar keluar dari kemiskinan dan pengangguran melalui kerja nyata di lingkungan sendiri.

Dalam merumuskan strategi pengembangan desa wisata dibutuhkan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi desa melalui rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama.
2. Identifikasi permasalahan yang bisa jadi penghambat bagi pengembangan potensi wisata desa, mulai dari yang bersifat fisik, non fisik atau sosial, internal dan eksternal. Atau bisa saja permasalahan tersebut jika diolah dengan cara tertentu justru permasalahan itu bisa menjadi potensi.
3. Perlunya komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa wisata.
4. Identifikasi dampak baik dampak positif maupun negatif dari sebuah kegiatan wisata sesuai kekhasan masing-masing desa. Masing-masing desa memiliki karakteristik sendiri akan menghasilkan dampak yang juga berbeda satu sama lain terutama perubahan-perubahan sosial kultural.
5. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk menggandeng Pemerintah Daerah dan jika perlu menggandeng pihak swasta. Pikirkan dan identifikasi juga dampak jika bekerja sama dengan pihak swasta. Termasuk di sini untuk penganggaran guna pembangunan desa wisata dengan menggunakan seluruh sumber daya ekonomi yang ada.
6. Menyiapkan segala perangkat-perangkat aturan/regulasi norma yang lebih bertujuan untuk mengawal pengembangan desa wisata dan mengawasi potensipotensi penyimpangan yang mungkin saja bisa terjadi. Regulasi disiapkan agar berjalannya aktivitas wisata beserta dampaknya tetap berada dalam koridor regulasi sebagai payung hukumnya
7. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh komponen desa, termasuk pemerintah desa tentang manajemen pariwisata, bagaimana mengelola tempat wisata, manajemen tamu/pengunjung, beserta inovasi-inovasi yang perlu

dikembangkan mengingat sebagaimana sektor lainnya sektor pariwisata pun mengalami fluktuasi dan bisa mengalami “kejenuhan”

8. Gunakan segala media untuk memperkenalkan dan mempublikasikan potensi wisata di desa baik media konvensional maupun non konvensional, seperti media internet. Internet kini menjadi sarana publikasi yang sangat efektif yang bisa menjangkau seluruh belahan bumi. Tempat wisata yang lokasinya terpencil pun bisa diketahui oleh orang di belahan dunia lain pun berkat teknologi internet.

Belajar pada kesuksesan desa wisata lain atau studi banding. Kita bisa belajar banyak pada keberhasilan desa wisata lain khususnya yang sejenis. Karena tipikal permasalahan dan tantangan masa depan yang bakal dihadapi kurang lebih sama. Hanya dengan manajemen profesional dan inovatif saja desa wisata akan eksis dan kompetitif dan dapat melalui ujian yang bersifat internal, eksternal maupun regional internasional.

Ringkasan

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan saranaprasarana. Strategi selalu berkaitan dengan 3 hal, yaitu tujuan, sarana, dan cara. Oleh karena itu, strategi juga harus didukung oleh kemampuan mengantisipasi hambatan yang ada. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

Latihan Soal

1. Jelaskan strategi pengembangan desa wisata di Indonesia?
2. Jelaskan dengan contoh langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pengembangan strategi desa wisata?

Tes Formatif

Essay

1. Menurut Richard Whittington membagi pendekatan dalam studi strategi menjadi empat, sebut dan jelaskan?
2. Dalam merumuskan strategi pengembangan desa wisata dibutuhkan langkahlangkah sebut dan jelaskan?
3. Bagaimana strategi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Moeljarto, jelaskan ?

BAB 4

MODEL PARTISIPASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan Pembelajaran:

Pada akhir pelayaran ini mahasiswa dapat:

Mampu memahami dan mempraktikkan bentuk partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pengantar

Pengembangan pariwisata di desa tidak lepas dari peran masyarakat desa sebagai bagian dari pemilik sah dari sebuah potensi yang dimiliki oleh desa. Desa tidak akan berkembang secara baik tanpa peran dari masyarakatnya. Institusi-institusi dari luar yang membantu berkembangnya sebuah desa menjadi desa wisata hanyalah supporting, namun keberhasilan yang menjadi penentu utama adalah masyarakat, yang perlu dibangun kesadaran mereka untuk berpartisipasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata di desa antara lain: membangun daya tarik wisata/ atraksi, membangun prasarana, penyediaan fasilitas wisata serta pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan adalah menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi wisata. Namun dari beberapa hal tersebut, yang paling utama adalah membangun kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka dalam proyek pengembangan pariwisata di desa. Partisipasi masyarakat local sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata di desa.

4.1. Model Partisipasi Dalam Pembangunan

Model pembangunan yang berorientasi pada manusia dirasa cocok oleh karena banyak orang meletakkan masyarakat lokal sebagai subyek dalam pembangunan dengan menekankan partisipasinya pada segala aspek. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memang mutlak diperlukan dan hampir tidak ada yang menyangkal terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menikmati hasil pembangunan tersebut. Namun dalam perjalanannya, partisipasi yang dipandang mutlak harus ada dalam pembangunan dipahami secara berbeda-beda, bahkan ada yang mengartikan partisipasi secara salah kaprah.

Para praktisi pembangunan mengklasifikasi arti dari partisipasi (Mikkelsen,

2003 dalam Muslim, A, 2007). Pertama, Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Maksudnya partisipasi hanya sekedar meminta dukungan masyarakat terhadap semua program yang telah disiapkan. Pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi (minta masukan dari warga masyarakat) yang dilaksanakan tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu karena masyarakat tidak diberi hak untuk merancang program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, diperintah dan bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu program yang telah dirancang sebelumnya.

Kedua, Partisipasi diartikan sebagai kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hampir sama dengan pemaknaan yang pertama, yang membedakan adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek. Karena itu akhir capaian dari partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Masyarakat harus mendukung atau ikut program-program pemerintah secara gratis dengan alasan program-program tersebut pada akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Proyek-proyek pembangunan yang memiliki anggaran tertentu harus dapat diselesaikan melalui penghematan-penghematan. Makin banyak penghematan atau makin murah biaya suatu proyek, maka dapat diartikan makin besar pula partisipasi masyarakat. Disini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana yang dapat dihemat atau dana yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah.

Ketiga, Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan yaitu mulai dari: 1). Keterlibatan pada identifikasi masalah, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2). Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3). Pelaksanaan proyek pembangunan. 4). Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. 5). Monitoring dan 6). Mitigasi, yaitu terlibat dalam mengukur dan mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh proyek yang sedang dilaksanakan.

Keempat, Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini adalah sikap

sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan sendiri. Keterlibatan sukarela itu bisa berupa terlibat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan, terlibat dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan dan terlibat dalam memilih hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Kelima, Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya, bersama-sama mengupayakan jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan segala sumber daya yang diperlukan serta secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Erickson, (1974) dalam Muslim, A (2007) memahami partisipasi dari dua sisi yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas. Sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar. Dari pemahaman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggungjawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar.

Satu hal yang juga penting dalam konsep partisipasi adalah bahwa partisipasi tidak hanya sekedar dipandang dari sisi fisik semata. Selama ini menurutnya ada kesan bahwa seseorang dikatakan sudah berpartisipasi apabila dia sudah terlibat secara fisik seperti ikut kerjabakti, ikut membantu material, ikut menghadiri pengajian (Suparjan, 2003 dalam Muslim A, 2007)). Padahal esensi yang terkandung dalam partisipasi sebenarnya tidak sesempit itu. Pemikiran atau sumbang saran dari masyarakat sebenarnya dapat dikatakan sebagai wujud dari partisipasi.

4.2. Pentingnya Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai Negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan masyarakat akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat

(people centered).

Salah satu agen pembangunan internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga seperti Indonesia merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri. Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, tumbuh semangat untuk bersaing dan menemukan hal-hal baru melalui partisipasinya. Pada konteks inilah, maka pendekatan partisipasi dengan melibatkan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, masyarakat adalah focus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiasi masyarakat. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan yang fokus dan sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan masyarakat tersebut sebagai penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Kedua, Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia, manusia membutuhkan makanan yang cukup untuk mengembangkan dirinya, membutuhkan perumahan dan pakaian yang bersih untuk menjaga kesehatannya, dan juga membutuhkan penerangan, transportasi dan alat komunikasi yang cukup agar dapat memudahkan hidup mereka. Pembangunan mesti harus meningkatkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia, tetapi pemenuhan barang-barang yang menjadi kebutuhan tersebut tetap bermuara pada pembangunan manusianya yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pembangunan yang melupakan aspek manusianya (partisipasi) jelas tidak menguntungkan. Hal ini karena akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik dalam proses, pelaksanaan maupun penerimaan hasil pembangunan. Sikap merasa tidak memiliki membuat mereka acuh tak acuh dan enggan terhadap hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya dapat menurunkan harkat dan martabat manusia.

Ketiga, Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari kegagalan program KB yang tidak memperhitungkan sikap masyarakat terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi

ataupun program perkebunan tembakau di Zambia yang direncanakan tanpa dasar pengetahuan mengenai keadaan politik dan sosial masyarakat.

Keempat, Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam semua kegiatan baik proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasilnya, karena mereka akan lebih puas mengetahui seluk beluk program/proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program/proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak dilibatkan. Kelima, Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Pembangunan yang memperluas keterlibatan masyarakat menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan control internal atas sumber daya materi dan non materi yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Keenam, Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *people centered development* yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Ketujuh, Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Sistem sosial budaya yang beraneka ragam harus dipahami dan disadari sebagai sumber daya atau modal sosial yang telah tersedia di masyarakat, walaupun di beberapa daerah sistem sosial budaya tersebut telah mengalami pergeseran dan mulai memudar, namun jika hal ini dimobilisasi kembali dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat, secara bertahap akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan persoalan sosial budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah ini. (Muljarto dalam Muslim, 2007)

Conyers (1994) dalam Muslim, A (2007) menyebut tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, Partisipasi merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa keterlibatannya program atau proyek pembangunan akan gagal. Kedua, Masyarakat akan mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, Partisipasi merupakan

hak demokrasi masyarakat jika mereka dilibatkan dalam pembangunan.

Sedangkan Suparjan (2003) dalam Muslim, A (2007) menyebut alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: Pertama, Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan program pembangunan. Kedua, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan posisi tawar menawar harga sehingga daya tawarnya menjadi seimbang dengan pemerintah dan pihak pemilik modal. Dan ketiga, Dengan partisipasi masyarakat mampu mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga terjadi sinergi antara sumber daya local, kekuatan politik pemerintah dan sumber daya modal dari investor luar.

Mengingat pentingnya partisipasi dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat. Dalam proses pembangunan, masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai obyek dari pembangunan tetapi sebaliknya masyarakat hendaknya dijadikan subyek dalam menentukan arah perkembangannya. Dengan demikian, apabila ada warga masyarakat yang melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dan penolakan itu dilakukan oleh mayoritas, maka pemerintah tidak boleh memaksakan kehendaknya, yakni dengan tetap menjalankan kebijakannya.

Dalam pengembangan desa wisata partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat merasa memiliki semua kekayaan dari pembangunan yang dilakukan selama ini. Peran pihak luar yang datang membantu masyarakat hanya bersifat menstimuli masyarakat untuk menyadari semua potensi yang dimiliki desanya dan bersama-sama dengan membangun desa.

4.3. Mewujudkan Masyarakat Partisipatif Dengan Metode Participatory Rural Appraisal

Ketidakmampuan masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan suatu program pembangunan seringkali menjadi sarana justifikasi bagi pembuat kebijakan untuk tidak mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan tersebut. Kondisi ini pada gilirannya akan membentuk kriteria nilai tersendiri yang menjustifikasi mekanisme formulasi implementasi ataupun evaluasi yang menjadi virus yang berbahaya bagi proses demokratisasi dalam pembangunan. Hal ini akan mengakibatkan masuknya unsur subyektifitas dari penguasa di dalam menentukan formulasi suatu kebijakan.

Alasan lain yang juga sering ditemukan dalam implementasi pendekatan partisipatif adalah kemungkinan munculnya konflik akibat dari banyaknya perbedaan

tuntutan dari warga masyarakat. Konflik bisa terjadi antar sesama warga masyarakat dan juga bisa terjadi karena perbedaan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Konflik ini terjadi karena masyarakat di daerah umumnya hanya melihat persoalan-persoalan pada lingkup daerahnya saja, sementara pemerintah pusat ditunjuk untuk mengakomodasi berbagai tuntutan atau aspirasi dari tiap-tiap daerah.

Di sisi lain, implementasi pendekatan partisipatif juga sering terhambat oleh faktor kapasitas organisasi. Keberhasilan setiap upaya untuk meningkatkan mutu para pelaksana, mutu perencanaan desentralisasi serta program pembangunan masyarakat yang efektif akan tergantung dari sebuah struktur organisasi yang efektif.

Pembentukan struktur semacam itu membutuhkan waktu, biaya dan pengorganisasian yang cukup lama. Dengan demikian, implementasi pendekatan partisipatif justru terkesan menjadi sebuah persoalan yang kurang efisien baik dari sisi waktu, biaya maupun tenaga.

Apapun alasan yang muncul yang membuat takut untuk mengimplementasi pendekatan partisipatif adalah karena pemahaman yang salah mengenai konsep partisipasi. Pemahaman yang benar mengenai konsep partisipasi dari warga masyarakat maupun para birokrat pemerintah di dalam melibatkan masyarakat pada akhirnya akan menjadi pintu masuk dalam setiap proses pembangunan. Jika selama ini partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dikaitkan dengan suatu kewajiban, maka sudah saatnya untuk menambahkan hak pada peran. Menambah hak pada peran nampaknya sangat cocok dengan menggunakan model Participatory Rural Appraisal (PRA).

Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat sasaran memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol bahkan mengubah program yang telah dikeluarkan oleh para perencana pembangunan. Karena itu untuk mengendalikan peran masyarakat dan perencana dalam melakukan proses pembangunan. Beberapa prinsip pendekatan ini yang menjadi dasar pijakan untuk implementasinya, yaitu:

1. Belajar secara langsung, dimana masyarakat secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan fisik, teknis dan sosial secara lokal.
2. Belajar secara cepat dan progresi, melalui eksplorasi yang terencana dan pemakaian metode yang fleksibel.
3. Komunikasi rilek dan bersifat kekeluargaan. Menyeimbangkan bias, rileks dan tidak tergesa-gesa, mendengarkan dan bukan menggurui, tidak memaksakan dan mencari masyarakat yang lebih miskin, kehadiran orang luar hendaknya masuk dalam proses diskusi sebagai anggota. Komunikasi yang ada harus bersifat kekeluargaan.

4. Optimalisasi pertukaran, mengaitkan biaya pemahaman dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dengan pertukaran antara kuantitas, kegayutan, keakuratan serta ketepatan waktu.
5. Membuat jaringan titik-titik pengukuran, dapat diartikan sebagai penggunaan waktu kisaran yang terdiri dari metode, diskusi, jenis informasi untuk pengecekan silang.
6. Mencari keanekaragaman, mencari hal yang berbeda-beda daripada rata-rata. Dalam hal ini, metode triangulasi dipergunakan untuk memperoleh informasi yang kedalamannya dapat diandalkan.
7. Pemberian fasilitas, artinya memberikan fasilitas penyelidikan, analisis, penyajian dan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka dapat menyajikan dan memiliki hasilnya serta juga mempelajarinya.
8. Kesadaran dan tanggung jawab diri yang kritis, fasilitator secara terus menerus menguji tingkah laku mereka dan mencoba melakukannya secara lebih baik. Kesalahan harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk belajar melakukan yang lebih baik.
9. Saling berbagi informasi dan gagasan antar sesama masyarakat desa, antar masyarakat desa dengan fasilitator, dan antar fasilitator yang berbeda, serta saling berbagi wilayah kegiatan, pelatihan dan pengalaman antar organisasi yang berbeda.

Upaya melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui metode PRA, pada dasarnya harus dimulai dari bawah yaitu melalui forum-forum warga baik yang berbasis pada komunitas atau kelembagaan seperti kelompok pengajian, kelompok yasinan, kelompok tahlilan, kelompok petani, kelompok arisan dan lain sebagainya maupun yang berbasis pada administratif seperti forum dasa wisma, RT, RW, LKKMD, *rembug desa* dan sebagainya. Mereka diajak untuk membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan kehidupan kesehariannya. Institusi-institusi semacam itu, sebenarnya dapat dijadikan sebagai wahana pembelajaran perilaku demokrasi yang efektif. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih mengefektifkan fungsi forum-forum tersebut tidak sekedar sebagai sarana untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pemerintah, tetapi harus dimanfaatkan untuk membicarakan berbagai isu yang terkait dengan kehidupan mereka. Misalnya, mereka diajak membicarakan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Warga masyarakat yang berkumpul melalui forum-forum itu diminta pendapatnya mengenai persoalan tersebut dan solusi yang mereka tawarkan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Mekanisme seperti ini yang akan membuat masyarakat terbiasa untuk selalu membicarakan

kepentingan bersama.

Forum-forum masyarakat ini yang seharusnya dijadikan sebagai institusi-institusi pada level bawah dan harus ditempatkan sebagai basis perencanaan pembangunan dari bawah. Melalui forum-forum ini, warga masyarakat dapat merumuskan aspirasi pembangunan yang kemudian dibawa ke institusi di tingkat desa (Badan Perwakilan Desa sebagai Lembaga legislatif) kemudian ke tingkat kecamatan dan seterusnya. Setelah ditetapkan sebagai program pemerintah kemudian diturunkan lagi ke tingkat bawah untuk dijalankan oleh masyarakat pembuat perencanaan tersebut. Dengan demikian prinsip *bottom up* dapat berjalan dengan baik dan proses, pelaksanaan serta hasil pembangunan dapat diru'kmati oleh masyarakat.

4.4. Macam dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut pendapat Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum yang intinya terdapat empat macam partisipasi yaitu:

- (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.
- (3) partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan. program yang bisa dicapai.
- (4) partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Kemudian dalam bentuk partisipasi, menurut Anthonius Ibori dalam Mardikantoro, partisipasi dapat berupa:

- 1) Partisipasi dalam bentuk pikiran (*psychological participation*).
- 2) Partisipasi dalam bentuk tenaga (*physical participation*).
- 3) Partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*).
- 4) Partisipasi dalam bentuk keahlian (*participation with skill*).
- 5) Partisipasi dalam bentuk barang (*material participation*).

Partisipasi dalam bentuk uang (*money participation*).

Sedangkan menurut Dusseldrop dalam Mardikantoro bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat berupa: a) Menjadi anggota

kelompok-kelompok masyarakat.

- b) Melibatkan pada kegiatan diskusi kelompok.
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasional untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Kemudian menurut Septiansari partisipasi dapat berupa:

- 1) Partisipasi dalam bentuk pikiran. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pemberian ide, saran, maupun pendapat dengan tujuan untuk pengembangan program kegiatan.
- 2) Partisipasi dalam bentuk tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga yang masyarakat miliki untuk membantu dalam berjalannya suatu program kegiatan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa ide, saran, pendapat serta tenaga yang dimiliki untuk membantu program kegiatan yang ada.
- 4) Partisipasi dalam bentuk keahlian. Partisipasi masyarakat yang diberikan berupa suatu kemampuan keahlian yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam program kegiatan yang mana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut.

Selanjut menjadi pertanyaan adalah kenapa seseorang atau kelompok tertentu melibatkan diri atau berpartisipasi dalam kegiatan. Ini disebabkan karena:

- a) *Pertama*, warga atau masyarakat akan berpartisipasi kalau mereka memandang penting isu-isu atau aktivitas tertentu.
- b) *Kedua*, warga atau masyarakat berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa tindakannya akan membawa perubahan, khususnya di tingkat rumah tangga atau individu, kelompok, dan komunitas.
- c) *Ketiga*, perbedaan bentuk-bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai.
- d) *Keempat*, orang harus dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya.
- e) *Kelima*, struktur dan proses partisipasi hendaknya tidak bersifat menjauhkan.

Ringkasan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa mutlak dibutuhkan. Apapun yang dilakukan oleh kampus di desa tanpa keterlibatan masyarakat local tidak akan ada artinya. Ini hanya akan menjadi sebuah monument, dimana pada masa tertentu orang akan mengingat bahwa di desa ada kegiatan partisipasi ini ditandai dengan tugu. Tetapi ketika masyarakat bisa digerakkan dan terlibat didalam kegiatan atau program maka monument tersebut tidak hanya menjadi tugu, tetapi akan menjadi budaya tersendiri senantiasa akan hidup walaupun. Jadi partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena mereka adalah pemilik desa, dan dengan demikian kegiatan tersebut akan berkelanjutan.

Latihan Soal

Dalam aktivitas di masyarakat silahkan mendemonstrasikan bagaimana cara-cara anda menggerakkan partisipasi masyarakat, kemudian diidentifikasi manakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat?

Tes Formatif

Essay

1. Seberapa pentingkah partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, jelaskan?
2. Menurut Dusseldrop apa saja bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat, sebut dan jelaskan?

BAB 5

MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Tujuan Pembelajaran:

Mahasiswa dapat memahami dan mempraktikkan model CBT, dalam kegiatan kepada pengabdian masyarakat.

Pengantar

Pariwisata adalah sector unggulan dan merupakan kunci penting dalam pembanguana wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pariwisata berkelanjutan mengedepankan prinsip-prinsip social dimana masyarakatdi sekitar destinasi wisata dapat terlibat dan ikut serta dalam menghidupkan potensi-potesni local yang ada. Tanpa partisipasi langsung dari masyarakat mustahil pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah pariwisata berbasis masyaralat.

Aspek penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah penekanan pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih focus terhadap partisipasi masyarakat local dalam merencanakan dan mengembangkan potensi destinasi wisata. Dengan terlibatnya masyarakat disuatu destinasi, maka pariwisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat local.

Memang harus diakui secara prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pemberdayaan dalam berbagai kegiatan kepariwisataan sehingga manfaat dari pariwisata sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh masyarakat local.

Pariwisata Berbasis Masyarakat – *Community Based Tourism*

Pemberdayaan masyarakat di lokasi-lokasi yang menjadi daerah tujuan wisata (destinations) melalui kegiatan usaha pariwisata merupakan salah satu model pembangunan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan dan akan menjadi agenda penting dalam pengembangan pariwisata ke depan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang tidak berdaya, tetapi harus berupaya meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, serta menjaga tatanan nilai-nilai budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya penguatan daya

(power) atau pemberdayaan kelompok masyarakat yang tidak berdaya, biasanya yang tergolong masyarakat yang terpinggirkan (Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013: 215).) Bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang meliputi devisa, tambahan pendapatan masyarakat, serta kesempatan kerja yang dapat ditangkap oleh masyarakat. Sektor usaha di bidang pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan lain-lain dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian lokal, regional dan nasional. (Sinclair (1998)

Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata telah menjadi bahan diskusi oleh beberapa pakar pariwisata. Bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan kegiatan yang berbasis masyarakat. Faktor utama adalah sumber daya dan keunikan masyarakat lokal, baik berupa unsur fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada masyarakat, yang harus menjadi motor penggerak utama dalam pariwisata. (Murphy (1988), Dawyer, Forsyth, dan Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013:219).

Mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat social dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat (Sunaryo 2013: 218). Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo, 2013: 219).

Dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Hal ini dikenal dengan nama *community-based tourism (CBT)* atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi CBT ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth-oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah banyak menyebabkan masyarakat local termarginalisasi dari kegiatan kepariwisataan pada sebuah destinasi wisata.

Pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan

keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen isik maupun non isik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri (Murphy dalam Sunaryo (2013: 139). Fokus utama kegiatan wisata adalah sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Maksudnya adalah:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi

Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community-based tourism*, yaitu:

1. Melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal (Sunaryo, 2013: 140).

Prinsip dari CBT yang harus dilakukan (Suansri (2003) yaitu:

(1) mengenali, mendukung dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata, (2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya, (3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan, (4) meningkatkan kualitas kehidupan, (5) menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal, (7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya, (8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia (9) mendistribusikan benefit dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat, (10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat, dan (11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Dari beberapa pendapat tersebut menyebabkan CBT sangat berbeda dengan pengembangan pariwisata pada umumnya (*mass tourism*). Dalam CBT, komunitas merupakan aktor utama dalam proses pembangunan pariwisata, dengan tujuan utama untuk

peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Ringkasan

Model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sangat cocok dan sejalan dengan kegiatan pengabdian khusus pariwisata, keduanya saling melengkapi.

Latihan Soal

Desain satu program kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Tes Formatif

Essay

1. Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, jelaskan?
2. Apakah fokus utama kegiatan wisata adalah sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas, jelaskan?

BAB 6

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran ini mahasiswa dapat:

Mampu memilih salah bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dan mampu menyusun proposal proyek kegiatan kepada masyarakat.

Pengantar

Pengabdian masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat di lokasi atau tempat tertentu dalam beberapa aktivitas atau program yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa dalam bentuk apapun. Program ini biasanya dirancang oleh berbagai perguruan tinggi (Universitas, Institut atau Politeknik) yang ada di Indonesia., dengan maksud untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa Indonesia, yang secara spesifik dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi meliputi: bentuk kegiatan dan sifat kegiatan.

6.1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa meliputi: Pendidikan kepada Masyarakat, Pelayanan kepada masyarakat, Penerapan Hasil Penelitian, Pengembangan Wilayah Secara Terpadu, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Alih Teknologi, dan Kaji Tindak.

1. Pendidikan Kepada Masyarakat.

Kegiatan pendidikan kepada masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia melalui pendidikan nonformal. Bentuk— bentuk kegiatannya dapat berupa: Pendidikan keluarga, panataran, kursus-kursus, lokakarya, penyuluhan, latihan, bimbingan kerja/teknis, proyek percontohan, dan kelompok belajar.

2. Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pelayanan yang dimaksud adalah pemberian layanan oleh Universitas Warmadewa secara professional kepada masyarakat yang memerlukan. Pelayanan yang diberikan berbentuk:

Perencanaan kota, studi kelayakan, pelayanan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan pertanian dalam arti luas, pelayanan manajemen, bantuan dan konsultasi hukum, pelayanan teknologi, dan komunikasi pendidikan, konsultasi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki serta kerja sama dengan badan-badan instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta ditingkat regional, nasional dan internasional.

3. Penerapan Hasil Penelitian.

Dapat berupa: Penerapan teknologi tepat guna, penerapan hasil-hasil penelitian, penerapan berbagai ilmu terapan dan sebagainya.

4. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu.

Pusat Pengabdian kepada masyarakat Universitas Warmadewa dalam mewujudkan kegiatan ini menetapkan desa binaan sebagai sentra aktivitas. Bekerjasama dengan Pemkab/Pemkot yang ada di Bali telah ditetapkan desa-desa yang menjadi desa binaan untuk jangka waktu lima tahun. Pembinaan dilakukan secara interdisipliner dengan harapan bias menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.

5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Pelaksanaan KKN Universitas Warmadewa dimulai tahun 1988/1989 dengan status intrakurikuler wajib. Sementara itu, KKN disetarakan dengan "Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Orientasi Kerja (POK)" yang dilakukan di masing-masing Fakultas atau program Studi dengan monodisiplin. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI No.

54/Dikti/Kep/2011, tentang Penugasan Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Pemerdayaan Peran Masyarakat (KKNPPM) bagi Dosen Perguruan Tinggi Tahun 2011, maka KKN dapat kembali dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan interdisipliner/multidisipliner.

6. Alih Teknologi

Merupakan kelanjutan pengembangan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi yang tidak hanya sebagai proses teknologi, tetapi merupakan paduan proses ekonomi, sosial, dan budaya. Teknologi yang dipilih harus dapat langsung dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat dan mampu menciptakan kegiatan yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.

7. Kaji Tindak

Kaji tindak adalah salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan cara

melaksanakan kegiatan (action) yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru serta memecahkan masalah dengan penerapan langsung gagasan-gagasan terhadap masalah-masalah actual dalam masyarakat atau di dunia usaha.

6.2. Sifat Kegiatan

1. Perintisan

Maksudnya adalah kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan. Kegiatan perintisan sering memerlukan uji coba di lapangan ataupun di masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian: secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, manfaatnya bagi masyarakat dapat diandalkan, dan dalam uji coba di lapangan masyarakat tidak dirugikan.

2. Penunjang

Kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatankegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan lain dengan tujuan mempercepat proses pembangunan. Kegiatan tersebut bisa bersifat komplementer atau suplementer.

6.3. Langkah-langkah Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Analisis Situasi

Sebelum melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus diketahui kesesuaian situasi dan kondisi khalayak sasaran. Dalam langkah ini, ada dua hal pokok yang harus ditentukan. Pertama, menentukan khalayak apakah masyarakat luas, komunitas tertentu, organisasi tertentu, atau orang-orang tertentu dalam masyarakat. Kedua, menentukan, bidang permasalahan yang akan dianalisis apakah itu secara komprehensif dengan pendekatan multidisipliner atau secara terbatas, artinya hanya terbatas pada satu dua bidang permasalahan saja.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengenali masalah yang sebenarnya dihadapi Oleh khalayak sasaran selanjutnya merumuskan permasalahan tersebut secara jelas. Masalah dalam hal ini diartikan sebagai perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi baru yang lebih baik.

3. Menentukan Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pada tahap ini harus jelas diketahui "kondisi baru" yang bagaimana diinginkan. Dengan kata lain, apa tujuan dari kegiatan yang dilakukan serta manfaat apa yang diperoleh masyarakat

dari kegiatan tersebut.

4. Rencana Pemecahan Masalah

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi dengan jelas, selanjutnya dicari pemecahannya. Perlu ditentukan alternatif yang mungkin dipakai kemudian dipilih alternative yang terbaik.

5. Menetapkan Khalayak Sasaran Strategis

Memilih orang-orang yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Biasanya dipilih anggota masyarakat, komunitas, organisasi atau individu yang dapat menerima dan menerapkan IPTEKS yang dijadikan materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pendekatan Sosial

Yang dimaksud adalah pendekatan terhadap khalayak sasaran. Prinsipnya adalah khalayak sasaran harus dijadikan subjek dan bukan objek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat harus disadarkan bahwa mereka menghadapi masalah seperti yang dirumuskan diatas.

7. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap pelaksanaan harus dibuat perencanaan yang matang dan jelas. Dalam perencanaan setidaknya mencakup: bagaimana kegiatan ini dilaksanakan, metode apa yang cocok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kapan serta dimana pelaksanaannya serta menetapkan orang-orang yang akan terlibat didalamnya.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Tindakan pemantauan dilakukan dari sejak awal hingga akhir kegiatan. Dengan demikian, kalau ada kesalahankesalahan atau penyimpangan-penyimpangan akan dideteksi lebih dini untuk kemudian dilakukan penyempurnaan. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah tercapai.

9. Pemantapan

Agar hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bisa menjadi bagian dari gerakan pembangunan khalayak, maka sangat diperlukan upaya untuk memelihara dan menetapkan hasil-hasil tersebut. Hal ini memerlukan pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan.

10. Pembuatan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat

Setelah selesai melakukan kegiatan pengabdian, mahasiswa / dosen pelaksana harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyusun artikel kegiatan pengabdian dan mempublikasin di media cetak offline/online
- b) Menyusun artikel ilmiah dan mempublikasikan di jurnal pengabdian
- c) Mengunggah kegiatan pengabdian di Youtube
- d) Peningkatan pemberdayaan pada Mitra baik kualitas maupun kuantitas.

Rangkuman

Langkah-Langkah Pengabdian Kepada Masyarakat: (a) analisis situasi, (b) identifikasi masalah, (c) menentukan tujuan dan mafaat kegiatan, (d) rencana pemecahan masalah, (e) menetapkan khalayak sasaran strategis, (f) pendekatan social, (g) pelaksanaan kegiatan, (h) pemantauan dan evaluasi, (i) pemantapan dan (j) pembuatan laporan pengabdian kepada masyarakat.

Latihan Soal

Tugas Kelompok menyusun proposal proyek kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti langkah-langkah pengabdian masyarakat.

Tes Formatif

Essay

1. Sebut dan jelaskan langkah-langkah kegiatan pengabdian pada masyarakat?
2. Apakah yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa setelah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat?

BAB 7
PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PARIWISATA

Tujuan Pembelajaran:

Pada akhir pelayaran ini mahasiswa dapat:

Mampu menyusun sebuah projek pengabdian dengan memilih salah satu bentuk pengabdian masyarakat; dapat berupa deseminasi hasil penelitian atau ipteks bagi masyarakat (IbM), menyusun sebuah luaran dalam bentuk publikasi jurnal, media cetak/elektronik dan atau mengunggah di youtube.

Pengantar

Kegiatan Penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi dikoordinasi atau dikelola oleh bagian tersendiri yang dinamakan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). Saat ini dalam rangka menjalankan agenda penelitian dan pengabdian masyarakat, dan menjamin keberlangsungan serta menjaga keunggulan kegiatan setiap P3M melakukan kegiatannya berdasarkan Renstra penelitian. Kampus biasanya telah mencanangkan penelitian baik pure science atau applied science dan strategis. Selain itu, tawaran kerjasama dari pihak-pihak luar dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai mitra dalam rangka meningkatkan inovasi dan mendorong pencapaian knowledge-based society serta menjawab kebutuhan stakeholder industri dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat di bersifat lebih fleksibel dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan penelitian. Jenis-jenis pengabdian masyarakat pada umumnya dilaksanakan berbasis pada bidang-bidang keilmuan di masing-masing Program Studi. Program diseminasi produk/teknologi kepada masyarakat merupakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah layak dihilirisasi ke masyarakat. Selain itu, ada program pengabdian masyarakat yang wajib dijalankan oleh mahasiswa sesuai kurikulum, yaitu mata kuliah pengabdian kepada masyarakat.

Berikut ini sebuah kasus implementasi kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian, dan Ipteks khususnya bidang pariwisata:

7.1. Model Deseminalisi Hasil Penelitian Bidang Pariwisata

Pengenalan Model Pengelolaan Ekowisata Terpadu, Daya Tarik Wisata Gunung Tumpa Pada Pelaku Pariwisata di Manado

1. PENDAHULUAN

Ekowisata adalah suatu bentuk pariwisata alternatif lain menggantikan jenis wisata massal yang dianggap terlalu mengeksploitasi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat. Ekowisata saat ini dikembangkan oleh banyak negara di dunia. Selain itu ekowisata dianggap sebagai bentuk pariwisata yang tidak merusak lingkungan ekologi dan sosial budaya masyarakat, serta bersifat mengkonservasi suatu kehidupan yang mengalami degradasi atau terancam kepunahan. Ekowisata akan menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitat yang ada disekitar lokasi karena aktivitas atraksi yang dikembangkan berdampak ringan hal ini juga akan mengedukasi bagi masyarakat sekitar kawasan dengan memberi nilai, berupa manfaat ekonomi / pendapatan bagi mereka yang berada disekitar kawasan yang dijadikan projek ekowisata.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Manado, Gunung Tumpa ini masuk sebagai lokasi produk Ekowisata Hutan dan Pegunungan. Namun pelaksanaan pengembangannya belum begitu maksimal, kebanyakan unsur laut lebih dominan di pasaran, sehingga dari segi tourist yang datang ke Kota Manado lebih banyak jenis diving tourist. Disamping itu yang memperbanyak kedatangan tourist ke Kota Manado disebabkan oleh event-event MICE yang sudah dilaksanakan selama ini.

Menurut Towoliu dan Takaendengan pada penelitian tahap awal yang dilakukan di tahun 2013 dan 2014 berlokasi di Manado tepatnya mengambil lokasi di wilayah Gunung Tumpa dengan pertimbangan yaitu dekat dengan kawasan Kota Manado,

Kawasan Taman Nasional Bunaken serta jalur penerbangan internasional (Sam Ratulangi Airport), dasar pemikiran yang diambil adalah selain memiliki keunikan lingkungan alam yang terintegrasi serta didukung dengan kehidupan sosial-budaya yang baik, indikator pembangunan yang lain juga sudah terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Gunung Tumpa memiliki keunikan kawasan: pegunungan, hutan, perkebunan, pantai, hutan mangrove dan didukung dengan kehidupan sosial budaya dengan pola budaya bertani dan nelayan yang terintegrasi dibentuk oleh lingkungan alam dan didukung dengan semangat kebersamaan dalam bahasa daerah disebut *mapalus*. Dari persepsi wisatawan juga menunjukkan bahwa setiap kawasan tersebut baik untuk dikembangkan dengan *range* nilai rata-rata 4, serta didukung

dengan pengukuran tingkat kepentingan setiap komponen atraksi, aksesibilitas, amenities serta pelayanan tambahan mendapatkan respons nilai yang sama yaitu rata-rata 4 yang artinya penting untuk dikembangkan.

Persepsi masyarakat lokal pun menunjukkan bahwa mereka menerima lokasi mereka dikembangkan dengan skor rata-rata keseluruhan adalah 84,2 yaitu sangat kuat. Menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wilayah gunung tumpa sebagai kawasan ekowisata sangat didukung sepenuhnya oleh masyarakat yang berada sekitar wilayah tersebut. Dengan demikian menandakan masyarakat local sepenuh hati ingin terlibat dalam rencana pengembangan project, baik terlibat langsung maupun dalam pemeliharaan lingkungan baik fisik maupun sosial-budaya di wilayah tersebut.

Hasil analisis SWOT yang melibatkan para *stake holder* lainnya, yang memiliki kepentingan dalam pengembangan wilayah tersebut menunjukkan bahwa posisi wilayah Gunung Tumpa untuk dijadikan sebagai produk ekowisata terpadu berada pada kuadran pertama (I). Artinya layak untuk dikembangkan sebagai produk ekowisata, dan diperlukan pengelolaan yang profesional secara terbatas mengikuti prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Sehubungan dengan penelitian awal yang menunjukkan hasil yang signifikan dimana wilayah Gunung Tumpa layak dikembangkan menjadi model ekowisata terpadu. Dimana setiap *stake holder* menilai positif, baik untuk dikembangkan apalagi masyarakat lokal menerima, serta para perencana dan penentu kebijakan juga menilai yang sama yaitu layak dikembangkan, maka pada tahapan selanjutnya adalah bagaimana model ekowisata terpadu tersebut perlu untuk diimplementasikan / diterapkan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi yang dihadapi dalam pengembangan daya tarik wisata yang selama ini ditemui adalah:

(a) Kurangnya pengetahuan pariwisata/ekowisata yang dimiliki oleh stake holder (pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola dan mengembangkan produk pariwisata.

Selama ini pola pengembangan yang ditempuh oleh pihak stake holder yang berdasarkan "guts feeling" atau reka-reka. Hal ini juga disebabkan oleh sumberdaya manusia lulusan dari para saraja atau pemikir khusus pariwisata yang masih kurang di Manado dan sekitarnya.

(b) Pola pengembangan pariwisata hanya bersifat partial, artinya dominasi satu ilmu dalam memberi kajian terhadap pariwisata. Pada hal pariwisata itu adalah trans-ilmu, yang harus dilihat pada dimensi *supply dan demand* ketimpangan itu berdampak pada

pincangnya pengembangan pariwisata/ekowisata sehingga produk yang dikembangkan tidak mengena ke masyarakat dan tidak laku di pasar.

Hal ini yang dilihat pada potensi daya tarik wisata Gunung Tumpa, pengelola hanya melihat potensi gunung tumpa, pada pengembangan satu atraksi yaitu Menikmati alam sekitar (*saightseeing*), (*bicycleline*), dan pola pengelolaannya tidak melihat secara holistik melibatkan masyarakat lokal yang ada disekitar Gunung Tumpa.

Sedikit gambaran temuan yang merupakan hasil penelitian; pada model yang dirumuskan ini merupakan hasil penelitian dari tahun 2014 s/d 2015. Penelitian ini sudah melewati dua proses pendekatan yang berbeda yang pertama pembuatan dan perumusan model tahun 2014 dan kedua uji Model 2015 melalui skema *Focus Group Discussion (FGD)* yang telah dilakukan di lima kelurahan / desa yang masuk dalam pendukung areal Gunung Tumpa.

Hilirisasi model ini melibatkan Pemerintah Kota Manado dengan para stake holder pariwisata di kota Manado, dengan maksud untuk diberikan pemahaman bagaimana model pengelolaan ekowisata sekaligus mendapatkan masukan sejauh mana pemahaman mereka dalam mengelola pariwisata khususnya wisata minat khusus seperti ekowisata, dengan mengambil sebuah kasus pengembangan ekowisata terpadu di Gunung Tumpa.

2. METODE PELAKSANAAN

Adapun kelompok sasaran dari pengenalan model pengelolaan ekowisata terpadu ini adalah para pelaku wisata yang ada dikota, kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Manado dengan Topik Utama adalah Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perwakilan pelaku wisata yaitu dari 1. Kelurahan Malalayang Dua, 2. Kelurahan Meras, 3. Kelurahan Tongkaina, 4. Kelurahan Wenang Utara, 5. Wisata Koenya-Koenya Kampung Tjina Manado, 6. Beachwalk Kawasan Megamas Pelaku yang berjumlah 42 orang. Metode kegiatan yang dilakukan adalah presentasi dan diskusi. Model pengelolaan pariwisata dan ekowisata yang bisa diimplementasikan pelaku wisata di kota Manado, dengan memberikan satu kasus pengembangan ekowisata gunung Tumpa, Manado. Materi pelatihan berupa identifikasi potensi wisata, pengembangan atraksi wisata dan cara-cara pengelolaan daya tarik wisata. Pada akhir sesi dilakukukan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Pelatihan dipandu oleh narasumber (tenaga ahli) dari Jurusan Pariwisata-Politeknik Negeri Manado.

Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya:

(a) Identifikasi potensi wisata. Pentingnya pemahaman identifikasi potensi wisata, dimaksudkan masyarakat (pelaku wisata) terlebih dahulu mengenal potensi apa saja yang bisa dikembangkan untuk dijadikan sebagai atraksi wisata. Dalam pengembangan atraksi ada 4 A, yang seringkali menjadi acuan yaitu attraction, accessibility, amenities dan ancillary, (Cooper. dkk, 1995).

Attraction digambarkan sebagai komponen utama yang memiliki keunikan tersendiri, seperti alam, social-budaya, ataupun buatan manusia. Accessibility terkait dengan sarana dan prasarana jalan dan transportasi dalam mendukung akses masuk ke daya tarik wisata. Selanjutnya amenity, berupa sarana pendukung seperti penginapan, rumah makan dsb, dan untuk ancillary atau tambahan seperti Lembaga pengelola, yang biasanya disediakan oleh pemerintah setempat.

Khusus untuk daya tarik gunung tumpa, hal tersebut sudah identifikasi yaitu terdapat potensi ekologis berupa; kawasan pegunungan, hutan, perkebunan, pantai, dan hutan mangrove. Untuk social budaya, terdapat beberapa suku yang mendominasi wilayah seputaran gunung tumpa antara lain: minahasa, sangir dan gorontalo, bajo. Kemudian untuk aksesibilitas, yaitu jalur dari Kota Manado ke daya tarik berjarak 13,5 km dan dari airport Sam Ratulangi hanya 15,2 km. Kemudian sarana dan prasarana disekitar objek wisata terdapat tokoh, pasar, dan penginapan dsb. (Towoliu, & Takendengan, 2014); (Mandulangi & Towoliu, 2019).

Setelah pembelajaran berupa berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan selanjutnya kepada para peserta diberikan juga pemahaman terkait berbagai atraksi dan paket wisata ekowisata yang dapat dikembangkan. Adapun atraksi dan paket wisata yang dapat dikembangkan di wilayah Gunung Tumpa antara lain: paket wisata jalan kaki yang dapat dibagi dua: yaitu jalan kaki santai (*fun trekking*) dan jalan kaki petualangan (*adventure trekking*). Paket wisata fun trekking bisa dilakukan dengan membuat jalur melewati perkebunan masyarakat serta sebagian perbukitan atau pegunungan. Selanjutnya paket wisata mendaki gunung. Walaupun puncak tertinggi Gunung Tumpa hanya ±623(dpl), namun pengembangan wisata mendaki gunung dapatlah diterapkan di kawasan setempat, dengan tema yang diangkat adalah melihat panorama matahari terbit (*sunrise*), matahari terbenam (*sunset*) serta gugusan kepulauan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bunaken. Selain itu paket wisata paket wisata naik sepeda gunung (*Mountain Bike*). Kegiatan dari paket wisata ini merupakan kombinasi olahraga dan rekreasi. Penawaran kepada wisatawan adalah melalui kegiatan ini wisatawan dapat

menikmati bersepeda sambil menikmati panorama pegunungan, pesisir pantai, perkebunan, dan perkampungan masyarakat dengan melihat aktivitas kehidupan masyarakat setiap hari. Paket wisata *arboretum Arboretum* adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi *ex-situ* (di luar habitat). Paket wisata melihat satwa endemik Memang lokasi Gunung Tumpa sudah berada dekat dengan kota Manado serta Kabupaten Minahasa Utara, sehingga kenderungan pengembangan kota mempersempit areal hutan yang berakibat pada kehidupan berbagai satwa endemic sulawesi, seperti Bird watching. Paket wisata berkemah (*Camping*) saat ini Gunung Tumpa sudah menjadi lokasi kegiatan berkemah dari anak-anak muda yang tinggal di Kota Manado, kegiatan ini masih bersifat sembarangan dan belum ada pengelolaan secara tepat. Paket wisata spiritual (*Retreat*), kegiatan ini sudah berlangsung di kawasan Gunung Tumpa yaitu pada bulan tertentu lokasi seperti Mamre Hills dan Bukit Doa dijadikan sebagai tempat retreat. Paket wisata agro, sebagian dataran rendah /perbukitan di wilayah Gunung Tumpa merupakan kawasan perkebunan kelapa, dan tanaman buah lainnya. Konsentrasi areal terluas terdapat di kelurahan Pandu. Paket wisata hutan mangrove hutan mangrove di wilayah Gunung Tumpa terdapat beberapa lokasi yaitu Sebagian Kelurahan Molas, Meras, Tongkaina dan Desa Tiwoho. Semua paket tersebut diperkenalkan kepada peserta untuk membuka pola pikir mereka dalam melakukan identifikasi serta pengembangan produk dan paket wisata.



Gambar 7.1. Pemberian Materi Pelatihan

(b) Kemudian pada tahapan selanjutnya para peserta diperkenalkan beberapa model pengelolaan ekowisata yang cocok berdasarkan kondisi wilayah, potensi wisata dan

kondisi masyarakat. Berikut ini beberapa contoh pengelolaan daya tarik wisata yang dikenakan. Dalam model pengelolaan pengembangan pariwisata di Bali Tengah memperkenalkan enam model, (Pujaastawa dkk, 2005), antara lain:

1. Pengelolaan oleh Desa Adat

Pengelolaan ini desa adat sebagai pengelola utama, unsur pemerintah, pelaku wisata dan warga *subak* (organisasi irigasi desa) sebagai mitra dalam pengelolaannya. Keterlibatan setiap unsur tersebut bersifat saling melengkapi kekurangan masing-masing mitra sehingga pengelolaannya menjadi satu bagian utuh.

2. Pengelolaan oleh *Subak*

Model pengelolaan ini memperkenalkan masyarakat setempat terlibat langsung dalam *subak* dalam usaha memberdayakan masyarakat, sedangkan pemerintah, pelaku pariwisata dan adat sebagai mitra kerja *subak* dalam pengelolaan.

3. Pengelolaan oleh Pelaku Wisata

Pada model ini pelaku wisata lebih banyak mengetahui tentang pariwisata, masyarakat lokal dan pemerintah hanya merupakan mitra kerja.

4. Pengelolaan oleh Pemerintah

Pengelolaan oleh pemerintah dalam bentuk badan usaha seperti dilakukan oleh di Bali terhadap pengelolaan kawasan Nusa Dua melalui BTDC (*Bali Tourism Development Corporation*).

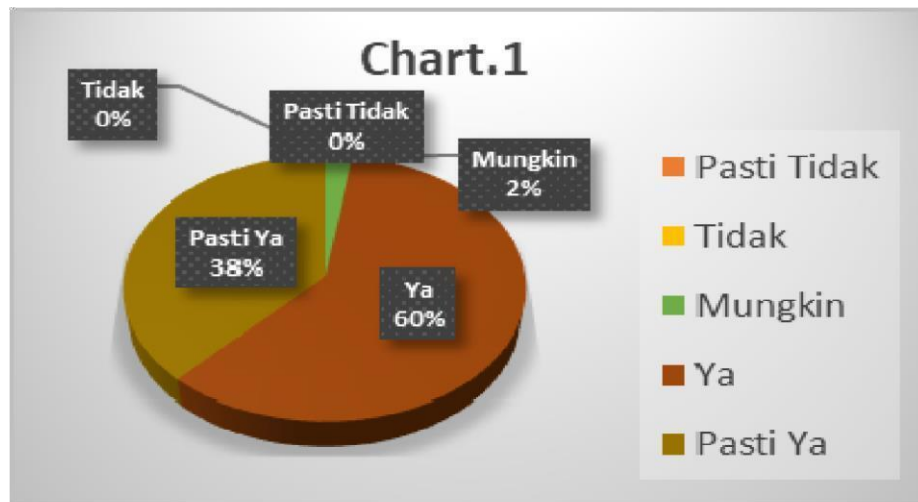
5. Pengelolaan oleh *Subak* dan Adat

Pengelolaan dilakukan oleh *subak* dan desa adat secara bersama-sama sedangkan pemerintah dan pelaku wisata sebagai mitra desa adat dan *subak*.

6. Pengelolaan oleh Badan Pengelola.

Model pengelolaan lebih menyetengahkan keterpaduan antar unsur-unsur yang terlibat dalam objek wisata, seperti: desa dinas, adat, *subak*, pemerintah, dan pelaku wisata.

Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kegiatan kepada pelaku wisata, selanjutnya juga dilakukan evaluasi dengan mengukur ketercapaian peserta dalam menerima dan memahami materi kegiatan pelatihan yang sudah diberikan. Berikut ini hasil evaluasi yang diambil terkait penyerapan materi dan pelatihan yang sudah dilakukan. Apakah menurut Anda pelatihan ini telah mencakup topik yang bermanfaat bagi Anda? Prosentase jawaban peserta terlihat pada chart 1.



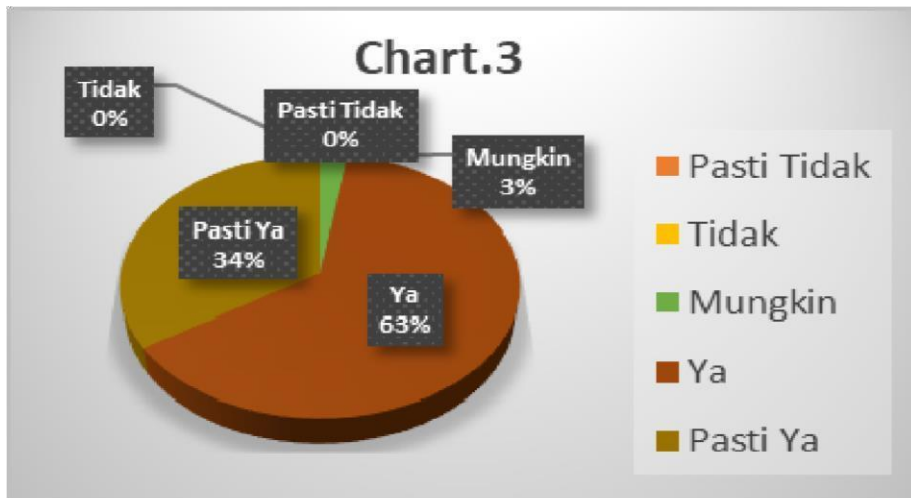
Sumber: data olahan penulis

Apakah Anda merasa percaya diri untuk melaksanakan hal-hal yang telah Anda pelajari dalam pelatihan ini? Prosentase jawaban peserta terlihat pada chart 2.



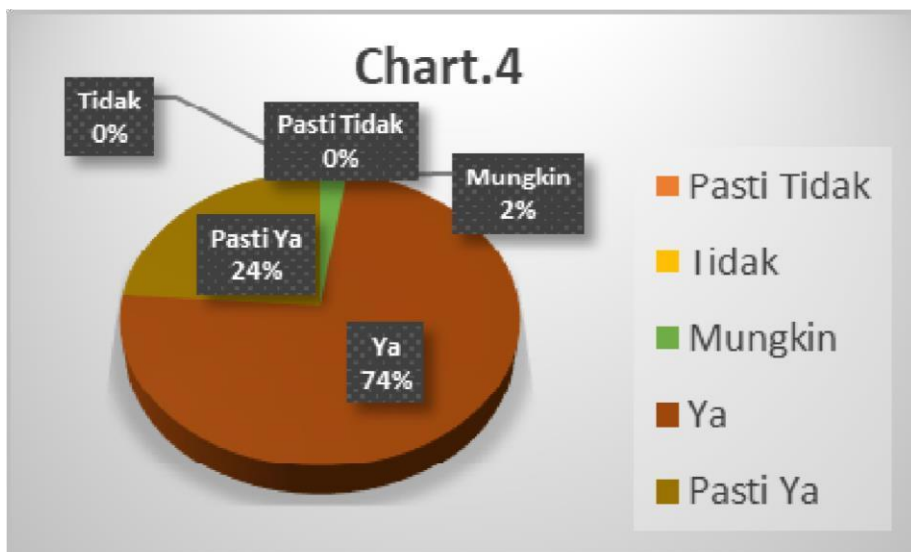
Sumber: data olahan penulis

Apakah Anda mendiskusikan ide-ide dan pengalaman Anda mengenai program Pelatihan? Prosentase jawaban peserta terlihat pada chart 3



Sumber: data olahan penulis

Apakah menurut Anda pengetahuan dalam mengelola daya tarik wisata akan membaik sebagai hasil dari keikutsertaan Anda dalam pelatihan ini? Prosentase jawaban peserta terlihat pada chart 4.



Sumber: data olahan penulis

Apakah Anda akan menganjurkan pelatihan ini kepada seorang kolega yang terlibat dalam pengelolaan wisata lainnya? Prosentase jawaban peserta terlihat pada chart 5.

Penutup

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan jawaban peserta yang positif berdasarkan beberapa kriteria indikator yang dievaluasi terkait topik-topik pelatihan yang diberikan.

7.2. Model IbM (Ipteks bagi Masyarakat)

Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan *Hospitality* Pada Kelompok Wisata Di Desa Budo, Kecamatan Wori, Propinsi Sulawesi Utara

Improvement of Knowledge and Skills of Hospitality in Tourism Group in Budo Village, District Wori, North Sulawesi Province

ABSTRAK

Sikap hospitality sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal ketika desa tempat tinggal mereka akan dijadikan sebagai desa wisata. Sikap ini sangat berhubungan dengan cara masyarakat dalam menyambut tamu yang datang bahkan menginap di desa wisata. Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan hospitality pada kelompok wisata di Desa Budo, kecamatan wori Kabupaten minahasa utara. Metode pelatihan dilakukan dalam bentuk: system pengajaran, simulasi melalui bermain peran, dan pada akhir pelatihan dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan materi yang diajarkan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dari kelompok wisata dan berdampak secara luas bagi masyarakat local di Desa Budo.

Kata Kunci: *Pengetahuan, Ketrampilan, Hospitality, Kelompok Wisata, Desa Budo*

ABSTRACT

A hospitality attitude is needed by the local community when the village where they live will become as a tourism village. This attitude is closely related to the way the community welcomes guests who come and even stay overnight in tourist villages. The aim of this training program is to improve hospitality knowledge and skills in tourism groups in Budo Village, wori sub-district, North Minahasa Regency. The training method is carried out in the form of: a teaching system, simulation through role play, and at the end of the training an evaluation of the entire material being taught is carried out. The expected outcome is an increase in the knowledge and skills of the tour groups and has a broad impact on the local community in Budo Village

Keywords; *Knowledge, Skills, Hospitality, Tourism Group, Budo Village*

PENDAHULUAN

Saat ini sektor pariwisata dijadikan sebagai *leading sector* pembangunan di Indonesia, yang berdampak pada perkembangan berbagai sector lainnya dalam mendukung sector kepariwisataan tersebut. Hal ini dirasakan dengan adanya perbaikan berbagai sarana dan prasarana diberbagai daerah yang menyentuh seluruh pelosok nusantara. Pariwisata merupakan sector yang *holistic* artinya menyentuh semua bidang sector lainnya, dikarenakan pariwisata sebagai *user* / pemakai dari semua intrastuktur yang tersedia, artinya pariwisata bisa jalan dengan baik ketika semua infrastruktur (sarana dan prasarana) tersedia dalam keadaan baik. Pariwisata tidak bisa berjalan dengan kalau semua infrastruktur dalam keadaan rusak dan tidak bisa digunakan secara baik.

Selain infrastruktur yang tersedia pariwisata juga membutuhkan orang-orang yang bisa mengimplementasikan setiap ketersediaan sector tersebut. Pariwisata sebagai

industry yang tergolong padat karya membutuhkan pekerja yang trampil serta memiliki *passion* dalam memberikan pelayanan jasa kepada tamu ataupun wisatawan yang datang ke destinasi tertentu. Bagi industry hospitality seperti hotel, tour and travel, restaurant, pekerja yang trampil dan cekatan serta memiliki sikap yang hospitality sangat dibutuhkan atau menjadi sebuah standart keharusan untuk industry tersebut. Artinya pekerja yang bekerja dibidang tersebut setidaknya memiliki latar pendidikan atau harus memiliki *skill* yang berhubungan dengan pariwisata.

Namun yang menjadi permasalahan sikap *hospitality* sangat dibutuhkan dalam mensukseskan kepariwisataan, dihubungkan dengan pariwisata yang akan dikembangkan di tatanan pedesaan tentunya ini membutuhkan konsentrasi yang serius dalam memecahkan apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah industry pariwisata. Dalam konsep pariwisata untuk kemiskinan (*propoor tourism*), Woodly, 1993, (dalam Pitana 2006) menyebutkan bahwa "*local people participation is a prerequisite for sustainable tourism.*" Artinya terdapat tiga komponen yang harus ada dalam konsep pemberdayaan yaitu : (1) *Enabling setting* ; memperkuat situasi kondisi ditingkat local menjadi baik sehingga masyarakat local bisa menari diatas panggung, (2) *empowering local community*, artinya masyarakat disiapkan, pengetahuan dan ketrampilan mereka ditingkatkan sehingga mampu memanfaatkan *setting* dengan baik dan (3) *socio-political support*, artinya ketika mereka sudah siap bermain maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain seperti dukungan social, politik, *networking* dan sebagainya.

Sehubungan dengan konsep pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat local; Roe dan Goodwin (2001) menekankan perlunya beberapa issue yang harus dilakukan agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu (1) komitmen pengusaha pariwisata untuk memperkerjakan penduduk local, (2) pengembangan usaha kecil, (3) terdapat pelayanan infrastruktur, keamanan, komunikasi, kesehatan dan sebagainya, (4) kepastian bahwa pariwisata tidak mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, (5) pembelajaran kepada penduduk local untuk *respect* terhadap budaya asli, (6) perbaikan keadaan, mencegah *negative impact* pariwisata, dan (7) partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pembuatan keputusan.

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata di tingkat desa perlu diberikan pembekalan secara serius mengingat desa memiliki ketertinggalan dalam pemahaman tentang pariwisata, lebih khusus kesiapan masyarakat di pedesaan dalam menyambut bahkan mendukung setiap program pariwisata. Problem ini menjadi permasalahan umum di hampir semua pedesaan di Indonesia.

Rendahnya pelayanan terhadap tamu tidak hanya terjadi pada masyarakat desa, namun juga pada masyarakat perkotaan, yang dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih maju. Hasil penelitian terhadap pelayanan pada tamu di industri restaurant kuliner lokal di Manado dimana kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan sebesar -1.35 artinya total rata-rata tamu tidak puas dari kinerja pelayanan yang diberikan pekerja lokal. (Towoliu, et.al). Dan ini juga terjadi di beberapa negara yang dianggap sudah lebih maju pariwisatanya seperti di Krotia dan China dimana kualitas pelayanan terhadap tamu masih rendah. Markovic, et.al (2010) dan Tan, et.al

(2014)

Hal ini terjadi di salah satu desa yang ada di propinsi Sulawesi Utara, di kabupaten Minahasa Utara kecamatan Wori, desa yang bernama Desa Budo. Desa ini berlokasi di pesisir pantai Wori yang berhadapan dengan Taman Nasional Bunaken, bahkan sebagian wilayah desa tersebut masuk dalam kawasan taman nasional tersebut sebuah kawasan yang sudah dikenal sebagai salah satu destinasi terbaik di Indonesia, namun pada sekitar kawasan tersebut praktik *hospitality tourism* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Desa Budo ini telah memprogramkan pariwisata sebagai program unggulan dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan atraksi tersebut. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola desa wisata ini yang tentunya berhubungan dengan sumber daya manusia di desa tersebut. Masalah yang paling di utama adalah pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan serta ketrampilan dalam menangani tamu yang datang. *Manner* masyarakat yang masih kaku serta tidak punya ketrampilan sehingga mereka membutuhkan pendampingan untuk dilatih dalam hal penanganan tamu yang datang. Di desa tersebut telah ada kelompok wisata namun masih belum terberdayakan secara maksimal.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pelatihan *hospitality* bagi kelompok wisata yang diikuti oleh 16 orang anggota peserta, dimana dua cara yang diterapkan yaitu pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Metode pelatihan dilakukan dalam bentuk: system pengajaran (*lecturing*) simulasi dalam bentuk bermain peran (*role play*), kemudian setelah itu dilakukan evaluasi sampai sejauh mana pemahaman peserta dalam menerima pengajaran terlebih khusus menyangkut daya tangkap masyarakat terhadap pembelajaran yang diberikan. Kegiatan ini dilakukan di Desa Budo selama 2 (dua) minggu lamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Budo. Desa Budo berlokasi di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berjarak 30 km dari ibu kota kabupaten, dan 4 km dari ibu kota kecamatan, 21 km dari Manado yang merupakan pusat ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan hospitality pada kelompok wisata yang ada di Desa Budo, (Towoliu, dkk2020). Jumlah anggota kelompok wisata ini adalah 16 orang, yang terdiri dari anak muda yang ada di desa. Ini sangat potensial mengingat mereka bisa menjadi *agent of change* yang akan memajukan desa Budo sebagai desa wisata. Selain itu untuk jangka pendek diharapkan mereka juga dapat menjadi *key person* untuk bisa men-transfer materi pembekalan yang didapat ke sesama anggota masyarakat lainnya. Ini merupakan pertimbangan dari tim pengabdian masyarakat dari Politeknik Negeri Manado.

Dalam meningkatkan pengetahuan dan skill hospitality, tim pengabdian masyarakat menggunakan dua metode pelatihan untuk menjangkau kekurangan pengetahuan dan ketrampilan dari peserta kegiatan. Dua model penyajian yang disampaikan adalah yaitu materi pengajaran (*lecturing*) dan simulasi/*role play*. Metode pengajaran dilakukan dengan maksud untuk membuka pemahaman peserta tentang hakikat pariwisata dan hospitality, sedangkan simulasi melalui *role play*, dilakukan untuk mempermudah peserta untuk memahami sekaligus mampu untuk mempraktikkan materi yang disampaikan.

Kegiatan dilakukan selama tiga hari penuh yang melibatkan peserta yang ada dalam kelompok wisata di Desa Budo.

Berikut ini metode tahapan proses peningkatan pengetahuan dan ketrampilan hospitality bagi kelompok wisata di Desa Budo.

1. Metode Pengajaran (*Lecturing*)

Penyajian materi yang diberikan berupa pengertian hospitality dan tata cara bersikap dalam menyambut tamu yang berkunjung ke desa. Empat karakteristik yang ada dalam hospitality yaitu:

(1) Ini diberikan oleh tuan rumah pada tamu yang jauh dari rumah. (2) Ini interaktif, melibatkan penyatuan penyedia dan penerima. (3) Ini terdiri dari perpaduan faktor berwujud dan tidak berwujud. (4) Tuan rumah menyediakan keamanan, kenyamanan psikologis dan fisiologis bagi tamu. (King, 1995 & Kunwar, 2017). Materi penyuluhan yang diberikan tim dari politeknik negeri dimaksudkan, untuk membuka pemikiran dari peserta bagaimana memberlakukan tamu, yang datang ke desa wisata secara baik dengan

benar. Pentingnya bersikap sebagai tuan rumah yang baik dalam melayani tamu dengan benar akan berdampak pada tamu, mereka akan merasa senang, berlamalama tinggal di desa dan kemungkinan untuk kembali itu sangat tinggi karena pasti tamu akan puas dengan sikap keramah-tamahan yang diberikan oleh tuan rumah. (Chatzigeorgiou, & Simeli, 2017).

Dalam proses penyajian materi ini pun tidak hanya bersifat monoton; dari penyaji saja namun juga dibangun dialog antara peserta dengan pemateri. Peserta senantiasa diberikan kesempatan untuk bertanya serta mengemukakan pengalaman mereka ketika pertama kali kedatangan tamu /wisatawan yang berkunjung ke desa. Bagaimana sikap dan perasaan mereka, ketika berhadapan dengan orang asing, semua diungkapkan oleh peserta untuk mendapatkan umpan balik dari pemateri. Pada intinya pemateri menyampaikan informasi bahwa sedapat mungkin untuk membuat tamu yang datang itu harus nyaman secara psikologis dan fisiologis berada di desa. Sesi pengajaran ini dilakukan selama lebih 1 hari dan didapati bahwa peserta merasa antusias dengan materi yang disampaikan.

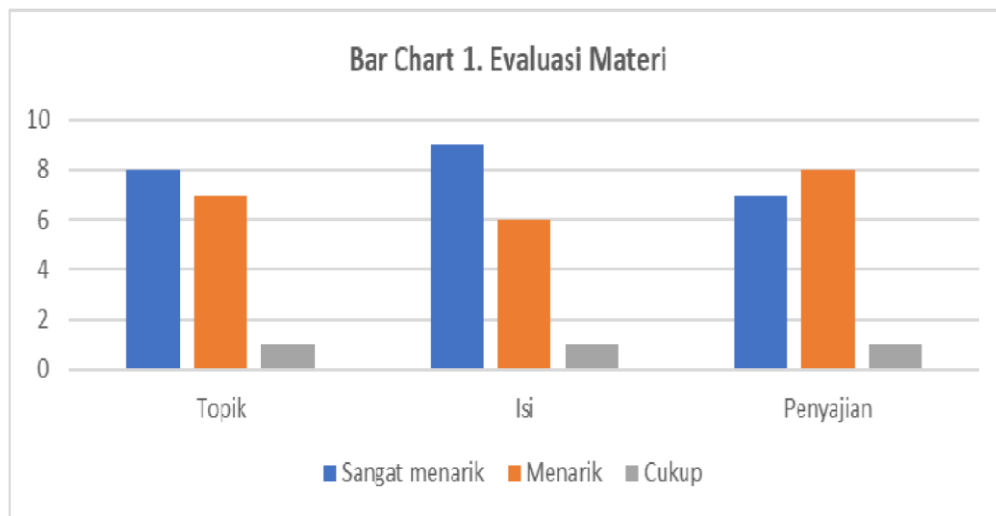
2. Metode simulasi / *role play*

Pada sesi simulasi dengan cara *role play*, para peserta secara bergantian bermain peran. Namun sebelum dilakukan *role play* para peserta ditunjukkan melalui slide video yang didalam video tersebut menunjukkan bagaimana pemilik wisata desa menyambut tamu asing yang datang ke desa. Tahapan-tahapan ditampilkan ketika wisatawan / tamu masuk ke desa, disambut oleh pengelola desa, menawarkan berbagai produk wisata yang ada di desa, selanjutnya diarahkan juga tamunya ke salah satu rumah yang sudah dijadikan sebagai home stay. Pada video tersebut menampilkan bagaiman sikap ramah yang harus ditampilkan oleh pemilik wisata dalam hal masyarakat local.

Adapun maksud dari metode *role play* ini supaya para peserta bisa mempraktikan bagaimana *manner* / sikap, cara bertutur kata dengan saat menyambut tamu, kemudian memberlakukan tamu selama mereka berada dilokasi wisata bahkan sampai tamu akan meninggalkan lokasi wisata. Hal ini sangat penting mengingat sikap, tutur kata gestur tubuh sangat juga mempengaruhi kesan tamu. (Legiansyah, 2018 & Utami, 2020). Metode simulasi dengan *role play* ini dilakukan selama dua hari dengan maksud pemateri bisa memantau sekaligus meng-koreksi ketika ada kesalahan dari peserta pada saat aktivitas *role play* ini berlangsung.

3. Evaluasi kegiatan

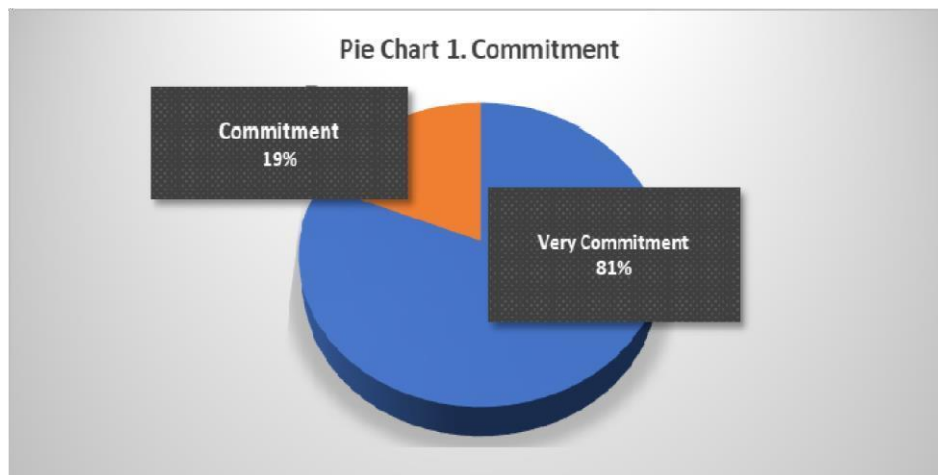
Setelah kegiatan penyampaian materi dan simulasi, pada akhir kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan evaluasi untuk mendapatkan *feedback* terkait materi yang disampaikan dan serta komitmen peserta untuk mempraktikkan materi yang diperoleh pada aktivitas pariwisata di desa Budo. Berikut ini hasil umpan balik dari peserta:



Sumber: data pemateri

Pada bar chart 1, terlihat hasil evaluasi materi yang disampaikan, untuk topik materi dimana rata-rata peserta menjawab materi sangat menarik dan menarik begitu tinggi, kemudian diikuti dengan isi materi dan teknik penyajian yang semuanya dinilai sangat menarik dan menarik.

Selanjutnya komitmen peserta untuk mempraktikkan materi yang didapati selama kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Budo, untuk diimplementasikan dalam aktivitas wisata.



Sumber: data olahan pemateri

Pada gambar pie chart 1, terlihat jawaban peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sangat berkomitmen 81% dan berkomitmen 19%, ini menunjukkan sikap positif yang disampaikan peserta, sekaligus masukan yang baik bagi tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Manado. Artinya kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil. Kegiatan selanjutnya adalah mentoring bagi peserta yang bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan peserta dengan menjalin kerjasama intens dengan pemerintah desa.

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim Politeknik Negeri Manado di Desa Budo, dapat dikatakan berhasil dengan melihat peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh peserta, melalui antusiasme dan komitmen yang dibangun oleh peserta latihan yang merupakan anggota kelompok wisata. Kedepan sebagai rekomendasi bagi politeknik negeri manado khususnya Jurusan Pariwisata dan tim pengabdian perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program pelatihan yang sudah dilakukan sehingga, akan terlihat kemajuan implementasi program.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kelompok pelaksana pengabdian masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Manado melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang mendanai kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Propinsi Sulawesi Utara.

Artikel Koran

Artikel koran tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi D4 Manajemen Perhotelan yang publikasi di media online.

2

AGAMA & PENDIDIKAN

KOMENTAREN

Edisi: 10 Mei 2019

Volume: 12

Dipraktasai Program Studi Perhotelan Jurusan Pariwisata

Lewat Pengabdian Masyarakat, Polimdo Bantu Desa Budo

MANADO - Mahasiswa Polimdo (Politeknik Manado) melakukan pengabdian masyarakat ke Desa Budo, Kecamatan Budo, Kabupaten Polimdo, Sulawesi Utara, pada Rabu (15 Mei 2019). Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Polimdo sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka.

Polimdo melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di Desa Budo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembagian sembako.

Polimdo juga melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di Desa Budo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembagian sembako.



Polimdo melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di Desa Budo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembagian sembako.



Polimdo melakukan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di Desa Budo. Kegiatan ini meliputi penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pembagian sembako.

OD: Lulusan SMAN 1 Manado Harus Berkualitas

MANADO - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dekaleng, mengatakan bahwa lulusan SMAN 1 Manado harus berkualitas. Beliau mengatakan bahwa SMAN 1 Manado adalah salah satu sekolah unggulan di Manado, sehingga lulusan dari sekolah tersebut harus memiliki kompetensi yang tinggi.

Olly Dekaleng mengatakan bahwa SMAN 1 Manado harus menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Beliau mengatakan bahwa SMAN 1 Manado harus meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Tuhan Membebaskan Emak-Nya

1 Teworikh 20-21

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan berfikir. Manusia harus menggunakan kemampuan berfikir tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Manusia harus selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan berfikirnya. Dengan demikian, manusia dapat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menerima Mahasiswa Baru Untuk jalur SBMPTN dan B2P Tahun Akademik 2019-2020

 Prof. Dr. Sigit H. Sembiring, M.Si	 N. Salsila L. Sembiring, S.Pd
 Dr. Sigit H. Sembiring, M.Si	 Dr. Sigit H. Sembiring, M.Si

Program Studi/Jurusan:

1. Pendidikan Matematika
2. Pendidikan IPA
3. Pendidikan Biologi
4. Pendidikan Fisika
5. Pendidikan Kimia

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DAN KAWALANGI MANADO FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

MENERIMA MAHASISWA BARU T/A 2019/2020

Jurusan Manajemen Sumberdaya Perikanan:

1. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perikanan (MSP)
2. Program Studi Budidaya Perikanan (BP)
3. Program Studi Ilmu Kelautan (IK)
4. Program Studi Agribisnis Perikanan (AP)

Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan:

1. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP)
2. Program Studi Perikanan Budidaya Perikanan (PBP)

Program Pengajar Dosis Perikanan (PDP)

Program Doktor Ilmu Kelautan (DIK)

Peneliti/ Pengajar: **Prof. Dr. Fanto S. Siregar, M.Sc**

Gambar 7.2 Artkel Koran

Rangkuman

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat pariwisata ini terdapat dua skema aktivitas kegiatan yang bisa dilakukan yaitu pengabdian dalam bentuk mengimplementasikan hasil penelitian pada masyarakat atau pengabdian IbM (Ipteks bagi Masyarakat).

Latihan Soal

Tugas Kelompok; Siswa disarankan untuk membuat kelompok dan membahas topik yang akan praktikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat wisata, serta menyusun luaran dengan memilih apakah berupa artikel yang dimuat di media cetak offline atau publikasi di jurnal pengabdian masyarakat, mengunggah aktivitas kegiatan di Youtube.

Tes Formatif

Essay

1. Buatlah sebuah artikel untuk publikasi di koran setelah anda melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat?
2. Buatlah rekaman kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan upload pada Youtube?

Daftar Pustaka

- Hayat, Ridwan M.A, Muchsin S, (2018), Pengelolaan Ekowisata Desa, Penerbit Intelegensia Media, Malang.
- Hayat, Ulum R, Zunaida D, (2018), Manajemen Ekonomi Desa, Penerbit Intelegensia Media, Malang.
- Hayat, & Zunaida D, (2018), Kemandirian Desa, Penerbit Intelegensia Media, Malang.
- Hayat, & Zaini R.A.N, (2018), Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Penerbit Intelegensia Media, Malang.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal:

- Andriany, D., HASIBUAN, L. S., & Rahayu, S. E. (2018). Pengembangan model pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Medan untuk memperbaiki taraf hidup. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).
- Muslim, A. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 8(2), 89-103.
- Oka, I. M. D., Winia, I. N., & Pugra, I. W. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Masakan Seafoods untuk Menunjang Pariwisata di Desa Wisata Serangan. *Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 1(1), 62.
- Sinclair, T. 1998. Tourism and Economic Development: A survey. *Journal of Development Studies*, 5, 1-51.
- Sudin, S. (2004). Pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi agama islam.
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2014). Potensi desa melalui pariwisata pedesaan. *Epigram*, 11(1).
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syah, F. (2017). Strategi mengembangkan desa wisata.
- Towoliu, B. I., & Permana, D. E. (2021). Pengenalan Model Pengelolaan Ekowisata Terpadu, Daya Tarik Wisata Gunung Tumpa Pada Pelaku Pariwisata di Manado. *JURNAL UMBANUA*, 1(1), 5-11.
- Towoliu, B. I., Polii, B. D., & Mandulangi, J. (2021). Improvement Of Knowledge and Skills of Hospitality in Tourism Group in Budo Village, District Wori, North Sulawesi Province. *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 956-960.

Rujukan dalam bentuk hasil penelitian:

- Towoliu B. I, & Takaendengan, M (2014-2015), Pengemabangan Model Ekowisata Terpadu di Wilayah Gunung Tumpa Propinsi Sulawesi Utara, Laporan Penelitian.
- Sangari F, Towoliu B.I & Permana D.E (2016-2017), Kajian Pengembangan Model Pelatihan Guest Service Pada Pramusaji Restoran Lokal Di Kawasan Wisata Kuliner Mega Mas & Sabua Bulu Malalayang, Kota Manado, Laporan Penelitian
- Towoliu B.I. & Permana D.E, (2017), Pengelolaan Ekowisata Pesisir Dalam Daerah Perlindungan Laut: Studi Kasus Di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Indonesia, Laporan Penelitian.

Glosarium

People-Centered – berpusat pada masyarakat

Participatory- partisipasi

Empowering-pemberdayaan

Sustainable- berkelanjutan

Something to see”- sesuatu yang bisa dilihat ditempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain.

Something to do – sesuatu yang bisa dilakukan disediakan pula fasilitas rekreasi atau *amusement* yang dapat membuat wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu. Something to buy- sesuatu yang bisa dibeli di tempat tersebut harus ada fasilitas untuk berbelanja, terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan rakyat sebagai oleh-oleh dibawa pulang.

Community-based tourism (CBT) - pariwisata berbasis masyarakat

KKN- Kuliah Kerja Nyata

Pro-poor tourism – pariwisata untuk kemiskinan

Indeks

- A**
- Arboretum*, 50
Atraksi, 5
- C**
- CBT, 37, 38, 39, 40, 64
- D**
- Desa, v, vi, 4, 10, 11, 20, 33, 51, 54, 56,
59, 62, 63
- E**
- Perencanaan, 15, 19, 41 Ekowisata, 47, 62, 63
Potensi, 21, 62
- Produk, 4, 5
- P**
- Pariwisata, i, v, vi, 1, 4, 18, 39, 47, 49,
54, 55, 59, 62
- Partisipasi, v, vi, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 34, 35, 62
- Pelatihan, vii, 49, 51, 53, 62, 63
- Pembangunan, 27, 28, 62
- Pemberdayaan, v, vi, 4, 6, 7, 8, 9,
16, 19, 26, 37, 62
- Pendekatan, 17, 18, 31, 44, 62, 57, 58,
- Pengembangan, iv, v, vi, 15, 18, 20, 41,
42, 47, 62, 63

F
 Program, v, vi, 15, 42, 60
 Proyek, 25

I

ICOMOS, 14, 15, 30, 31

K
 Kesehatan, 13
 Strategi, v, vi, 17, 19, 20, 22, 62
 KKN, 41, 42, 64
 Swadaya, 11

L
leading sector, 1, 54

M
 Metode, 30, 49, 54, 56, 57, 58

R
 restoran, 2
Rethinking Empowerment, 6
 Identifikasi, 21, 49
Rural Appraisal,

S
 Swasembada, 11
 Teknologi, 41, 42

T

W
 wisatawan, 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 48, 50, 55, 57, 58, 64

Fasilitas, 5, 6



Biodata Penulis

Benny Irwan Towoliu, lahir di Manado tanggal 21 September 1973. Menamatkan S1 Management di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, tahun 1998. Melanjutkan Studi Magister Pariwisata di Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana Bali dengan mengambil Konsentrasi Perencanaan Kawasan Pariwisata, lulus 2012. Aktif mengajar, meneliti serta sebagai asesor kompetensi bidang Pariwisata sejak tahun 2008. Peneliti aktif bidang pariwisata dan sejak 2013 telah beberapa kali memenangkan hibah penelitian baik di internal institusi maupun di tingkat nasional melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi (DRPM-DIKTI).



Bernadain Dainty Polii, Menamatkan pendidikan S1 di IKIP Manado, S2 di UNIMA serta S3 di UNJ Bidang Manajemen Pendidikan. Memiliki pengalaman di Industry Perhotelan pernah menjabat sebagai Supervisor Housekeeping, dan asesor kompetensi Bidang Pariwisata. Sebagai pengajar dan peneliti aktif bidang pariwisata pernah mendapatkan hibah penelitian baik di internal institusi maupun di tingkat nasional melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi (DRPMDIKTI). Saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado



ISBN 978-623-5928-27-2

